



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

LAPORAN KINERJA 2017



SIPUHH Memperoleh Tropi Top 40
Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017

Panen Padi di Desa Suweto



Sambutan Adat Saat Kunjungan
Direk PHPL di Desa Golo Damo



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis Ditjen PHPL pada tahun 2017. Ditjen PHPL selaku penjaga utama kelestarian hutan produksi seluas 68,8 juta hektar, mengemban tugas memastikan bagaimana hutan produksi dikelola secara berkelanjutan, mendukung perekonomian nasional sekaligus membantu upaya mensejahterakan masyarakat.

Selama tahun 2017, Ditjen PHPL telah melaksanakan Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan sebagaimana tertuang dalam Indikator Kerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja Dirjen PHPL dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan konfigurasi bisnis baru pengelolaan hutan produksi, beberapa hal luar biasa telah dicapai pada tahun 2017 antara lain meningkatnya ekspor produk industri kehutanan; meningkatnya akses masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi yang sekaligus mengangkat ekonomi masyarakat; mengantarkan SIPUHH meraih penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik tingkat nasional; dan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap konsistensi pemerintah Indonesia dalam upaya penanggulangan perdagangan kayu ilegal, dengan menempatkan perwakilan Indonesia sebagai Chair of EGILAT 2018-2019.

Dari hasil pengukuran kinerja, nilai kinerja organisasi Ditjen PHPL mencapai **109,02%**, dengan efisiensi penggunaan sumber daya terkatagori **efisien**. Nilai tersebut merupakan capaian kinerja Indikator Kinerja Program : Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Devisa dan Penerimaan Negara, Jumlah unit KPHP yang bekerja sama dalam pengelolaan hutan produksi, serta Jumlah unit KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran.

Semoga Laporan Kinerja ini mampu memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada *stakeholders*, baik unsur pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. Atas tercapainya target kinerja Ditjen PHPL dan tersusunnya Laporan Kinerja ini, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada seluruh jajaran Ditjen PHPL.



Jakarta, Februari 2018
Direktur Jenderal

IB Putera Parthama
IB Putera Parthama, Ph.D.
NIP. 19590502 198603 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL tahun 2017 terdiri dari 2 (dua) Sasaran dan 4 (empat) Indikator Kinerja Program.

Tabel i. Capaian Kinerja Ditjen PHPL Tahun 2017

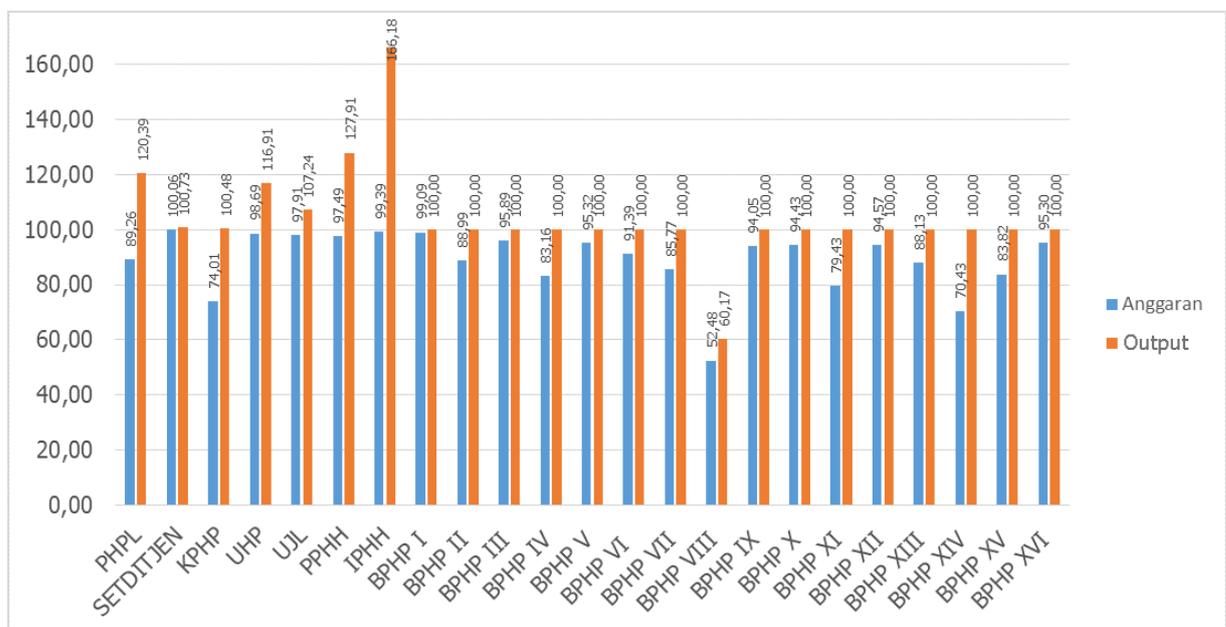
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya sumbangan PNBP dari Hutan Produksi (termasuk industri)	Jumlah PNBP dari hutan produksi	Rp. 2,796 T	Rp. 2,822 T	100,93
Meningkatnya nilai ekspor industri hasil hutan kayu	Nilai ekspor produk industri kehutanan	USD 8,03 M	USD 10,98 M	136,74
Meningkatnya kerja sama KPHP dalam memproduksi barang dan jasa	Jumlah KPHP yang melakukan kerja sama pengelolaan hutan produksi	63 KPHP	62 KPHP	98,41
Menurunnya luas areal kebakaran hutan produksi	Jumlah KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran	53 KPHP	53 KPHP	100,00
Rata-rata				109,02
Input		448.654.987.000	400.467.306.582	89,26
Output		100%	109,02%	109,02
Nilai Efisiensi				0,82
Kategori				Efisien

Berdasarkan analisis capaian 4 (empat) Indikator Kinerja tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Program untuk sasaran strategis pertama yaitu jumlah PNBP dari hutan produksi. Pada tahun 2017, target PNBP sebesar Rp. 2,796 Triliun dengan realisasi sebesar Rp. 2,822 Triliun (100,93%). Jika dibandingkan dengan target Renstra (2015-2019) sebesar Rp. 3,127 Triliun, realisasi PNBP tahun 2017 telah mencapai 90,25%.

2. Target ekspor produk industri kehutanan tahun 2017 sebesar USD 8,03 Miliar, dengan realisasi sebesar USD 10,98 Miliar (136,74%). Dibandingkan dengan target sampai dengan tahun 2019 sebesar USD 40,37 Miliar, realisasi sampai dengan tahun 2017 sebesar USD 29,87 Miliar telah mencapai 73,99%.
3. Target jumlah unit KPHP yang melakukan kerjasama dalam memproduksi barang dan jasa adalah 63 unit KPHP dengan realisasi sebesar 62 unit KPHP (98,41%). Indikator kinerja jumlah KPHP yang melakukan kerjasama pengelolaan hutan produksi baru ditargetkan pada tahun 2017, dan capaian pada tahun 2017 (62 unit) adalah sebesar 46,62% dibandingkan target sampai dengan tahun 2019 (133 unit).
4. Target jumlah unit KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran adalah 53 unit KPHP dengan realisasi sebanyak 53 unit KPHP (100%). Indikator kinerja jumlah KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran baru ditargetkan pada tahun 2017, dan capaian pada tahun 2017 (53 unit) adalah sebesar 51,96% dibandingkan target sampai dengan tahun 2019 (102 unit).

Pagu APBNP Ditjen PHPL tahun 2017 sebesar Rp448.654.987.000,- dengan realisasi sebesar Rp400.467.306.582,- (89,26%).



Gambar i. Realisasi Anggaran dan Output (%) Ditjen PHPL Tahun 2017

Melalui aplikasi e-Monev DJA yang difasilitasi Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, kinerja suatu organisasi dapat diukur berdasarkan indikator penyerapan anggaran, konsistensi penarikan dana, capaian keluaran, dan efisiensi. Berdasarkan hal tersebut Ditjen PHPL memperoleh nilai kinerja sebesar 86,09% (BAIK).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
C. Peluang dan Tantangan Hutan Produksi Tahun 2017	6
D. Sistematika Laporan Kinerja	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
A. Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2017	9
B. Program dan Sasaran Program Tahun 2017	10
C. Kegiatan dan Sasaran Unit Kerja	11
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	12
E. Pengukuran Kinerja Ditjen PHPL	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Realisasi Anggaran	37
C. Capaian Outcome Program	38
D. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	39
BAB IV. PENUTUP	44
Lampiran	45

DAFTAR TABEL

Tabel i.	Capaian Kinerja Ditjen PHPL Tahun 2017	iii
Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Ditjen PHPL Tahun 2017	13
Tabel 2.	Capaian Kinerja Program Ditjen PHPL Tahun 2017	15
Tabel 3.	Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	15
Tabel 4.	Perbandingan Realisasi PNBPN Tahun 2015, 2016 dan 2017	18
Tabel 5.	Perbandingan Nilai Ekspor Tahun 2015, 2016 dan 2017	23
Tabel 6.	Perbandingan ekspor Berdasarkan Kawasan Tahun 2015, 2016 dan 2017	24
Tabel 7.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat yang Menjadi Mitra KPHP (40 KPHP)	28
Tabel 8.	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015, 2016 dan 2017	37
Tabel 9.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar i.	Realisasi Anggaran dan Output Ditjen PHPL Tahun 2017	iv
Gambar 1.	Infografis Capaian Kinerja Ditjen PHPL Tahun 2017	1
Gambar 2.	Struktur Organisasi Ditjen PHPL	5
Gambar 3.	Top 10 Negara Tujuan Ekspor Industri Kehutanan Indonesia	6
Gambar 4.	Capaian Indikator Kinerja Program Dibandingkan Target Renstra /IKU Tahun 2015-2019	17
Gambar 5.	Tampilan Muka Sistem Informasi PNBP	20
Gambar 6.	SIPUHH Memperoleh Piagam Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017	21
Gambar 7.	SIPUHH Memperoleh Tropi Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017	21
Gambar 8.	Tim SIPUHH Menghadiri Konferensi Internasional " <i>Innovation in Government: The New Normal</i> " di paris Perancis	22
Gambar 9.	Peluncuran SIPHPL oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ..	23
Gambar 10.	Refleksi Satu Tahun Lisensi FLEGT, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta	25
Gambar 11.	Seminar Bertajuk Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia dan "Clean Wood Act" di Tokyo, Jepang	26
Gambar 12.	Grafik Pendapatan Masyarakat yang Menjadi Mitra KPHP	29
Gambar 13.	Kegiatan Tanam dan Panen Padi Ladang di Desa Suweto, KPHP Kendilo	30
Gambar 14.	Bioetanol Produksi KPHP Boalemo	31
Gambar 15.	Lebah Hutan dan Produksi Madu KPHP Batulanteh	31
Gambar 16.	Beberapa Produk KPHP Berbasis Usaha Masyarakat di Wilayah KPHP	32
Gambar 17.	Wisata Alam Desa Ekowisata di KPHP Batulanteh	32
Gambar 18.	Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPH Non Perizinan Mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/Menlhk/Setjen /Kum.1/9/2017	34
Gambar 19.	Perbandingan Jumlah Titik <i>Hotspot</i> pada Tahun 2015-2017	36
Gambar 20.	<i>Dashboard</i> Monev Anggaran (Aplikasi SMART) Kinerja Ditjen PHPL	41
Gambar 21.	<i>Dashboard</i> Monev Bappenas yang Menampilkan Kegiatan Ditjen PHPL	41
Gambar 22.	Tampilan <i>Web Release</i> Ditjen PHPL Bulan Desember 2017	42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
- Lampiran 2. Realisasi Anggaran Ditjen PHPL Tahun 2017
- Lampiran 3. Realisasi Anggaran dan Output Ditjen PHPL Tahun 2017
- Lampiran 4. Realisasi IKK Ditjen PHPL Tahun 2017
- Lampiran 5. Capaian Indikator Kinerja Ditjen PHPL Tahun 2015-2017
- Lampiran 6. KPHP yang Melakukan Kerja Sama Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2017
- Lampiran 7. KPHP yang Dapat Dilindungi dari Ancaman Kebakaran Tahun 2017

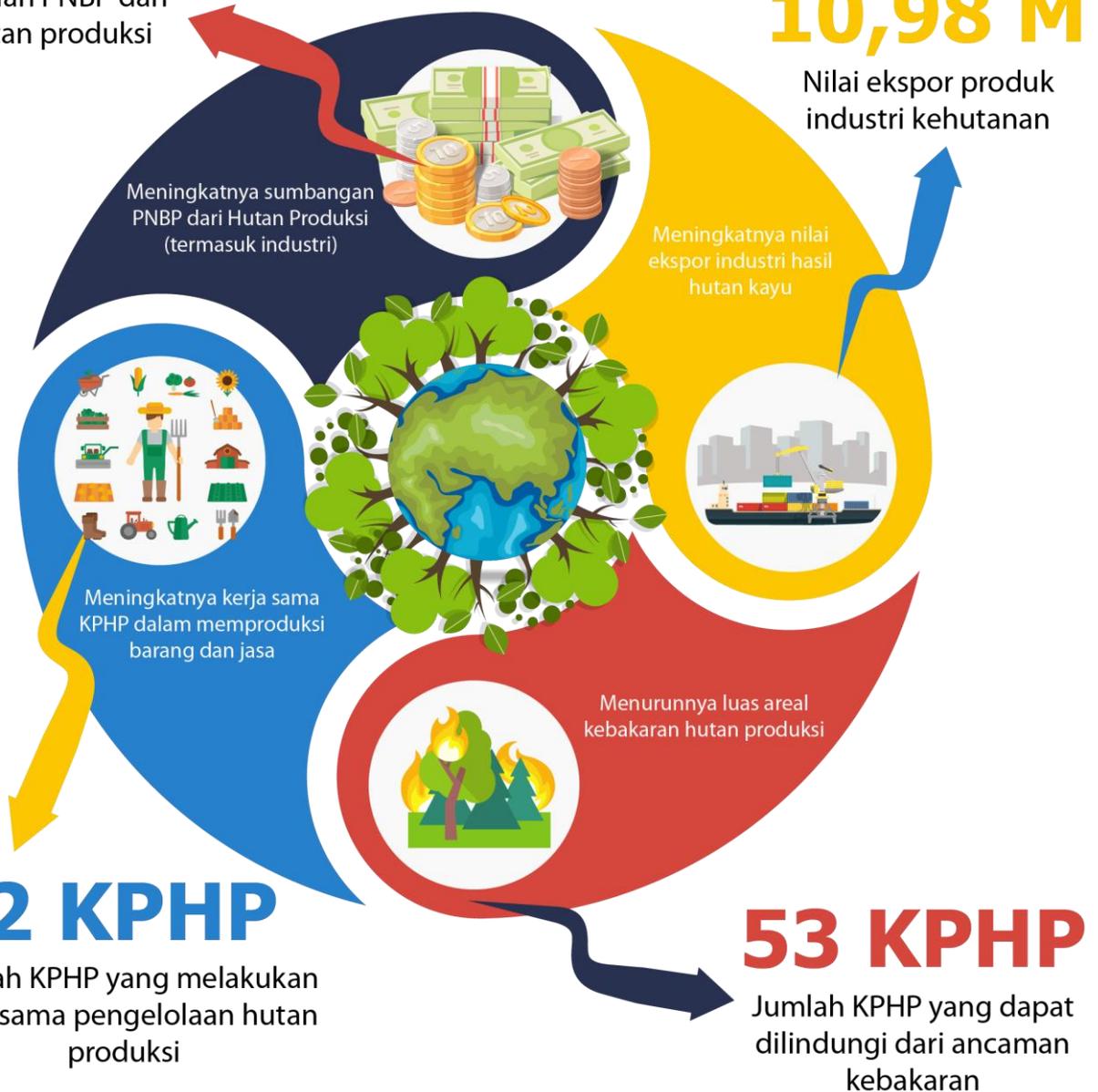
CAPAIAN KINERJA DITJEN PHPL TAHUN 2017

**Rp.
2,822 T**

Jumlah PNBP dari hutan produksi

**USD
10,98 M**

Nilai ekspor produk industri kehutanan



Gambar 1. Infografis Capaian Kinerja Ditjen PHPL Tahun 2017

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan sumbangan Hutan Produksi (termasuk industri) pada Devisa dan Penerimaan Negara, berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan nilai ekspor produk industri kehutanan, serta untuk meningkatkan pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari, dengan meningkatkan jumlah KPHP yang melakukan kerjasama pengelolaan hutan produksi dan jumlah KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran, dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1 /9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) 2017 ini merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta merupakan bagian dari upaya perbaikan yang berkesinambungan oleh setiap instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam upaya mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan melalui penandatanganan PK tahun 2017. Di samping itu laporan ini juga dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja, mensinergikan perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan unit kerja, serta menjadi masukan dan umpan balik sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PHPL dapat berjalan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Sejak tahun 2015 Ditjen PHPL bertekad bulat menyelamatkan hutan produksi Indonesia dengan mencanangkan titik belok perubahan kebijakan pengelolaan hutan produksi. Dengan semangat perubahan ini, Ditjen PHPL menetapkan konfigurasi bisnis baru pengelolaan hutan produksi dengan melakukan :

- 1) Peningkatan akses masyarakat dan ekonomi masyarakat sekitar hutan, dan kewajiban mengalokasikan 20% areal izin dalam bentuk usaha kemitraan dengan masyarakat;
- 2) Kontribusi terhadap NDC (*Nationally Determined Contribution*) melalui pembentukan unit manajemen multibisnis KPHP yang sekaligus sebagai wujud pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dan penerapan RIL (*Reduce Impact Logging*) oleh pemegang izin;
- 3) Penyederhanaan birokrasi dengan menerapkan sistem informasi;
- 4) Peningkatan daya saing produk dan ekspor dengan melakukan berbagai upaya keberterimaan produk di pasar global;
- 5) Peningkatan PNBP dari Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan.

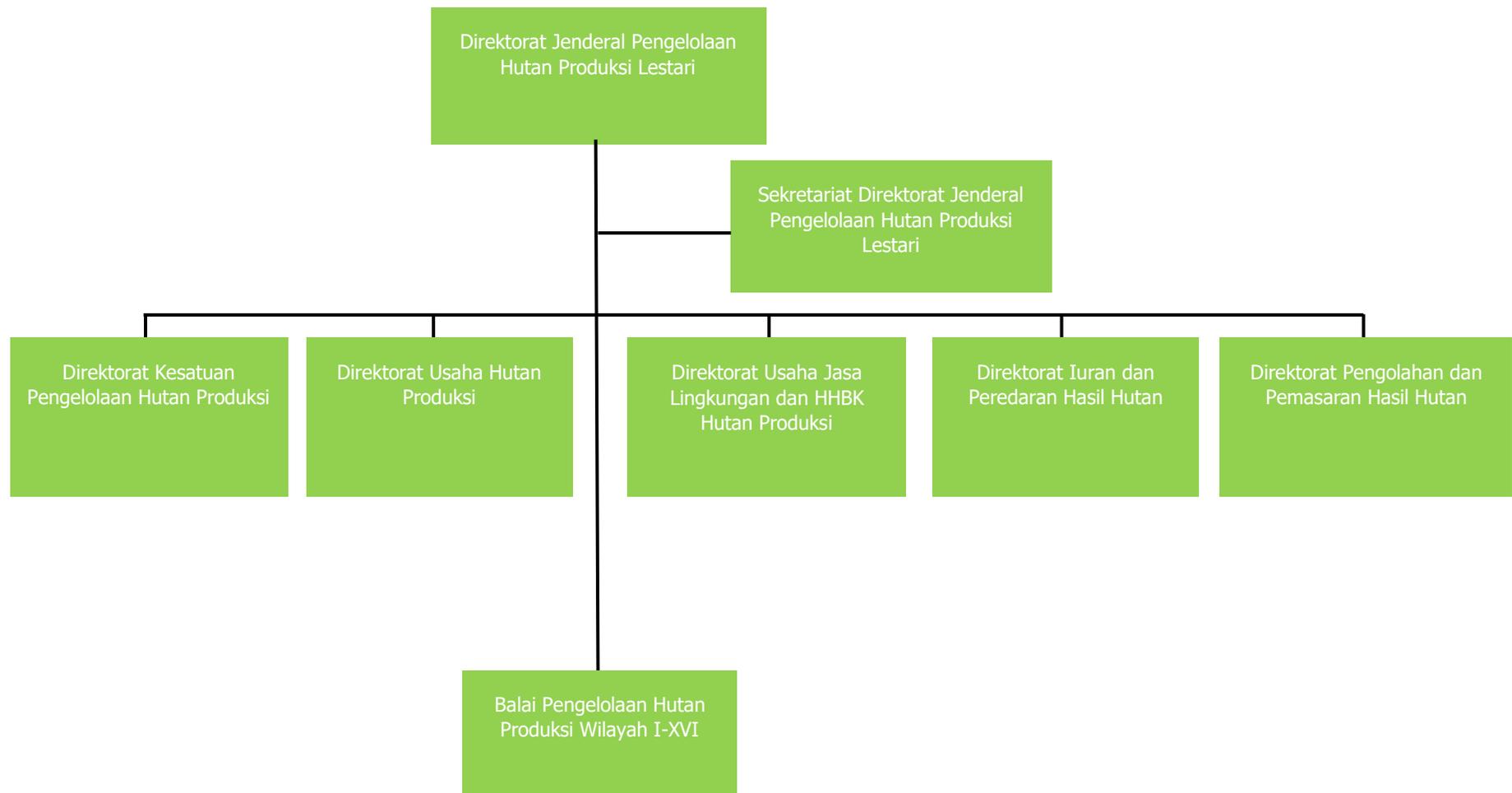
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Ditjen PHPL sesuai dengan tugasnya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan produksi secara lestari. Dalam melaksanakan tugasnya Ditjen PHPL menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu.

Dalam menjalankan tugasnya, Ditjen PHPL didukung oleh 865 orang pegawai, yang ditempatkan pada 6 (enam) unit satker pusat dan 16 (enam belas) unit satker balai. Dalam konteks perimbangan pegawai, terdapat 307 orang pegawai di unit satker pusat dan 558 orang pegawai di unit satker balai. Selain itu, Ditjen PHPL juga mempertimbangkan komposisi pegawai dari segi golongan, pendidikan, usia dan kompetensi. Komposisi yang berimbang ini merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja Ditjen PHPL.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi, Ditjen PHPL didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari : (1) Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; (2) Direktorat Usaha Hutan Produksi; (3) Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi; (4) Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan; (5) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan; (6) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; serta (7) Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I sampai dengan XVI.



Gambar 2. Struktur Organisasi Ditjen PHPL

C. Peluang dan Tantangan Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2017

Meningkatnya permintaan akan hasil hutan khususnya kayu dan produk turunannya, sebagai konsekuensi bertambahnya jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Sebagai negara tropis yang salah satu sumber devisa berasal dari hutan, adanya peningkatan permintaan konsumen tersebut merupakan peluang bagi Indonesia.



Gambar 3. Top 10 Negara Tujuan Ekspor Industri Kehutanan Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, hutan produksi mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Produksi hasil hutan ini untuk memenuhi konsumsi manusia (terutama kayu) yang terus meningkat setiap tahunnya. Atas kecenderungan tersebut, pengelolaan hutan produksi ke depan dihadapkan untuk mengelolanya secara bijaksana dan berkesinambungan sebagai bekal generasi berikutnya. Penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi secara lestari menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Ditjen PHPL. Tahun 2015, Ditjen PHPL mencanangkan sebagai tahun perubahan dalam pengelolaan hutan produksi. Perubahan paradigma pengelolaan hutan produksi diawali dengan melakukan revolusi mental pada seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan) pengelolaan hutan produksi yang diawali di lingkungan Ditjen PHPL. Sumber Daya Manusia

(SDM) Ditjen PHPL sebagai pengelola hutan produksi harus bekerja lebih berkualitas, mampu menerima setiap tantangan dan perubahan yang semakin cepat, dan mampu melakukan terobosan-terobosan baik inovasi maupun regulasi. Ditjen PHPL masih terus berinovasi dalam mengembangkan teknologi berbasis spasial. Pada tahun 2016, seluruh UPT Ditjen PHPL (16 Balai Pengelolaan Hutan Produksi/BPHP) telah dilengkapi dengan Citra Resolusi Tinggi, Drone dan penggunaan sistem informasi dalam penerapan kebijakan pengelolaan hutan produksi. Dengan penggunaan teknologi tersebut kegiatan pengawasan dan pengendalian hutan produksi dituntut lebih berkualitas, baik dari substansi pengelolaan maupun areal yang diawasi. Pada tahun 2017 Ditjen PHPL menetapkan konfigurasi bisnis baru pengelolaan hutan produksi dengan mengedepankan produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan.

Secara garis besar tantangan yang dihadapi Ditjen PHPL sebagai pengelola hutan produksi diantaranya :

1. Mempercepat operasionalisasi KPHP dan terwujudnya KPHP yang profesional sebagai wujud pengelolaan hutan berbasis tapak;
2. Mewujudkan unit-unit pemegang izin yang profesional;
3. Mewujudkan institusi Pemerintah yang handal dalam pengawasan dan pengendalian Hutan Produksi;
4. Menurunkan tingkat kebakaran hutan dan lahan sebagaimana target *zero haze* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Meningkatkan produktifitas Hutan Alam, pertumbuhan Hutan Tanaman Industri dan Restorasi Ekosistem;
6. Meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya hutan untuk meningkatkan daya saing produk hasil hutan.

D. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Laporan Kinerja Ditjen PHPL tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Bab I. PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*)

2. Bab II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar: Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017.

3. Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja sesuai PK, berdasarkan hasil pengukuran setiap pernyataan/sasaran, indikator dan target kinerja, baik secara numerik (perbandingan), maupun deskripsi substantif berdasarkan

hasil analisis.

- Membandingkan

- antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra;
- realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

- Analisis

- Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Efisiensi penggunaan sumber daya;
- Hal-hal yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2017

Pembangunan sumber daya hutan khususnya hutan produksi bertujuan untuk meningkatkan tata kelola hutan produksi dalam rangka meningkatkan daya saing industri kehutanan. Produktifitas tidak hanya diukur dari hasil kayu saja melainkan meliputi semua aspek fungsi hutan secara utuh termasuk kepentingan para pihak terhadap sumber daya hutan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan hutan produksi tahun 2017 diarahkan pada :

1. Pelaksanaan Prioritas Nasional tahun 2017 yang berlokus di KPHP berupa :
 - a. Berjalannya usaha produktif masyarakat pedesaan di wilayah kerja KPHP berupa usaha hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan (ekoturisme) terpadu hulu – hilir;
 - b. Pengamanan wilayah KPHP dari gangguan dan konflik;
 - c. Perlindungan wilayah KPHP dan perlindungan kualitas hidup masyarakat dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.
2. Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam diversifikasi produk HHBK unggulan/jasa lingkungan.
3. Membangun tata kelola pengawasan yang handal melalui koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas atas tupoksi dan kewenangan pusat dan daerah (Ditjen PHPL, Dinas Provinsi, BPHP dan KPHP).
4. Deregulasi peraturan-peraturan pengawasan di sektor hulu antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007; Permenhut Nomor P.39 Tahun 2008; Permenhut Nomor P.46 Tahun 2015; dan Permen LHK Nomor P.21 Tahun 2015, sedangkan Peraturan-peraturan terkait di sektor hilir antara lain Permenhut Nomor P.17 Tahun 2009 dan P.13 Tahun 2015 khususnya Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang berkapasitas < 2.000 m³.
5. Optimalisasi PNBP yang akan dilakukan melalui :
 - a. Pemungutan PNBP khususnya pada Kawasan Budidaya Kehutanan hasil pembukaan lahan/*land clearing* HTI, perkebunan dan pertambangan.
 - b. Pemungutan PNBP pada HHBK melalui identifikasi, inventarisasi pada pemegang izin maupun bukan pemegang izin yang memungut HHBK dari kawasan hutan.
 - c. Memacu progres penanaman dan meningkatkan produksi pada hutan alam dan tanaman.
 - d. Penyempurnaan ketentuan terkait tarif atas jenis PNBP.

6. Peningkatan integritas Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis PHPL melalui reformulasi kewenangan/tugas Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis PHPL (revisi Permenhut Nomor P.54 Tahun 2014).
7. Pengembangan SIPUHH untuk mengakomodir seluruh bentuk perizinan termasuk software pemeriksaan melalui lacak balak yang ada sesuai dengan perkembangan regulasi serta memfasilitasi peran KPHP sebagai institusi pemerintah dan pengelola kawasan hutan di tingkat tapak.

Secara garis besar, pada tahun 2017 Ditjen PHPL menempuh perubahan paradigma kebijakan pengelolaan hutan produksi yang lebih berkeadilan tanpa mengabaikan aspek lingkungan, agar terjadi keseimbangan ketiga fungsi hutan (ekonomi, sosial, dan ekologis). Area perubahan dimaksud antara lain adalah :

1. Reposisi masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi yang selama ini sebatas pekerja, menjadi pelaku usaha;
2. Mempertahankan fungsi ekologi hutan produksi untuk mencapai target NDC (*Nationally Determined Contribution*);
3. Meningkatkan daya saing produk hasil hutan dan ekspor melalui pemangkasan birokrasi, sertifikasi, dan pengembangan sistem informasi.

B. Program dan Sasaran Program Tahun 2017

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2017 Ditjen PHPL berkontribusi pada 7 (tujuh) program Prioritas Nasional yaitu :

1. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) untuk kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Produksi, Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu, dan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan;
2. Kedaulatan Energi untuk kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Produksi;
3. Pembangunan Pariwisata untuk kegiatan Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu;
4. Peningkatan Ekspor Non Migas untuk kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan;
5. Desa dan Kawasan Pedesaan untuk kegiatan Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan;
6. Pelayanan Kesehatan untuk kegiatan Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan;
7. Revolusi Mental untuk kegiatan Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan.

Program yang diemban oleh Ditjen PHPL tahun 2017 adalah Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan dengan sasaran 1) Meningkatnya sumbangan PNPB dari hutan produksi (termasuk industri) 2) Meningkatnya nilai ekspor industri hasil hutan kayu 3) Meningkatnya kerja sama KPHP dalam memproduksi barang dan jasa 4) Menurunnya luas areal kebakaran hutan produksi. Untuk pencapaian program tersebut telah ditetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Program sebagai ukuran keberhasilan program, yaitu :

1. Jumlah sumbangan PNPB dari hutan produksi (termasuk industri) sebesar Rp2,796 Triliun;
2. Nilai devisa dari ekspor produk industri kehutanan sebesar USD 8,03 Miliar;
3. Jumlah unit KPHP yang melakukan kerja sama pengelolaan hutan produksi sebanyak 63 unit;
4. Jumlah KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran sebanyak 53 unit.

C. Kegiatan dan Sasaran Unit Kerja

Upaya pencapaian sasaran Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan serta pencapaian Indikator Kinerja lebih lanjut diimplementasikan menjadi 7 (tujuh) kegiatan, yaitu :

1. Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi.
Sasaran dari kegiatan Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi adalah areal hutan produksi tertata dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan rencana unit-unit usaha pemanfaatan hutan. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
2. Peningkatan Usaha Hutan Produksi
Sasaran dari kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Produksi adalah meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman; meningkatnya pemanfaatan hutan produksi untuk mendukung pembangunan energi baru dan energi terbarukan; dan seluruh UPHHK-HA dan HT aktif beroperasi pada tahun 2019. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Usaha Hutan Produksi (UHP)
3. Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK
Sasaran dari kegiatan Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK adalah meningkatnya produksi HHBK dan investasi usaha jasa lingkungan. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK (UJLHHBK HP).
4. Peningkatan Tertib Penatausahaan dan Iuran Kehutanan
Sasaran kegiatan Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran

Kehutanan adalah optimalnya ketertiban penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai ketentuan. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan (IPHH).

5. Peningkatan Usaha Industri Kehutanan

Sasaran kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan adalah meningkatnya investasi dan ekspor produk industri kehutanan. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH).

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas teknis Ditjen PHPL. Penanggungjawab kegiatan ini adalah Sekretariat Ditjen PHPL.

7. Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan

Sasaran kegiatan Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan adalah meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi oleh KPHP dan unit-unit usaha pemanfaatan hutan. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I sampai dengan XVI.

Masing-masing kegiatan tersebut memiliki sasaran yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Ditjen PHPL disajikan pada Tabel 1 dan Lampiran 1.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Ditjen PHPL Tahun 2017

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
a.	Meningkatnya Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Devisa dan Penerimaan Negara.		
	- Meningkatkan sumbangan PNBPN dari Hutan Produksi (termasuk Industri)	Jumlah PNBPN dari hutan produksi	Sebesar Rp 2,796 Trilyun
	- Meningkatkan nilai ekspor industri hasil hutan kayu	Nilai ekspor produk industri kehutanan	Sebesar US\$ 8,03 Milliar
b.	Meningkatnya Pengelolaan Hutan Produksi di Tingkat Tapak Secara Lestari		
	- Meningkatkan kerja sama KPHP dalam memproduksi barang dan jasa	Jumlah KPHP yang melakukan kerja sama pengelolaan hutan produksi	63 KPH
	- Menurunnya luas areal kebakaran hutan produksi	Jumlah KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran	53 KPH

E. Pengukuran Kinerja Ditjen PHPL

Pengukuran kinerja Ditjen PHPL tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/ SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk pemantauan dan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen PHPL 2015-2019 berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor: P.1/PHPL-SET/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Standar Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen PHPL Tahun 2015-2019.

Untuk indikator kegiatan jumlah PNBPN di hutan produksi, penetapan target lima tahunan tidak bersifat kumulatif. Sedangkan untuk ketiga indikator kegiatan lainnya, penetapan targetnya bersifat kumulatif.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Ditjen PHPL dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen PHPL memiliki 4 (empat) Sasaran Program yaitu:

1. Meningkatnya sumbangan PNBP dari Hutan Produksi (termasuk industri);
2. Meningkatnya nilai ekspor industri hasil hutan;
3. Meningkatnya kerjasama KPHP dalam memproduksi barang dan jasa;
4. Menurunnya luas areal kebakaran hutan produksi;

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, ditetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Program yaitu:

1. Jumlah PNBP dari hutan produksi;
2. Nilai ekspor produk industri kehutanan;
3. Jumlah KPHP yang melakukan kerjasama pengelolaan hutan produksi;
4. Jumlah KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran;

Berdasarkan 4 (empat) Sasaran Program dan 4 (empat) Indikator Kinerja Program tersebut, Ditjen PHPL melakukan pengukuran capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja organisasi Ditjen PHPL tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Program. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh hasil bahwa capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL rata-rata sebesar **109,02%**. Nilai capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum, program yang dilaksanakan oleh Ditjen PHPL telah mencapai target/tujuan yang ditetapkan. Pencapaian kinerja ini merupakan hasil dari komitmen Ditjen PHPL pada tahun 2017 untuk meningkatkan *performance* melalui tiga pilar kebijakan dalam pemanfaatan hutan produksi, yaitu tata kelola yang tepat, pelayanan cepat dan pengendalian cermat. Capaian kinerja tahun 2017 meningkat dibanding dengan tahun 2016 (108,54%). Capaian kinerja program Ditjen PHPL selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Capaian Kinerja Program Ditjen PHPL Tahun 2017

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya sumbangan PNBP dari Hutan Produksi (termasuk industri)	Jumlah PNBP dari hutan produksi	Rp. 2,796 T	Rp. 2,822 T	100,93
Meningkatnya nilai ekspor industri hasil hutan kayu	Nilai ekspor produk industri kehutanan	USD 8,03 M	USD 10,98 M	136,74
Meningkatnya kerja sama KPHP dalam memproduksi barang dan jasa	Jumlah KPHP yang melakukan kerja sama pengelolaan hutan produksi	63 KPHP	62 KPHP	98,41
Menurunnya luas areal kebakaran hutan produksi	Jumlah KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran	53 KPHP	53 KPHP	100,00
Rata-rata				109,02

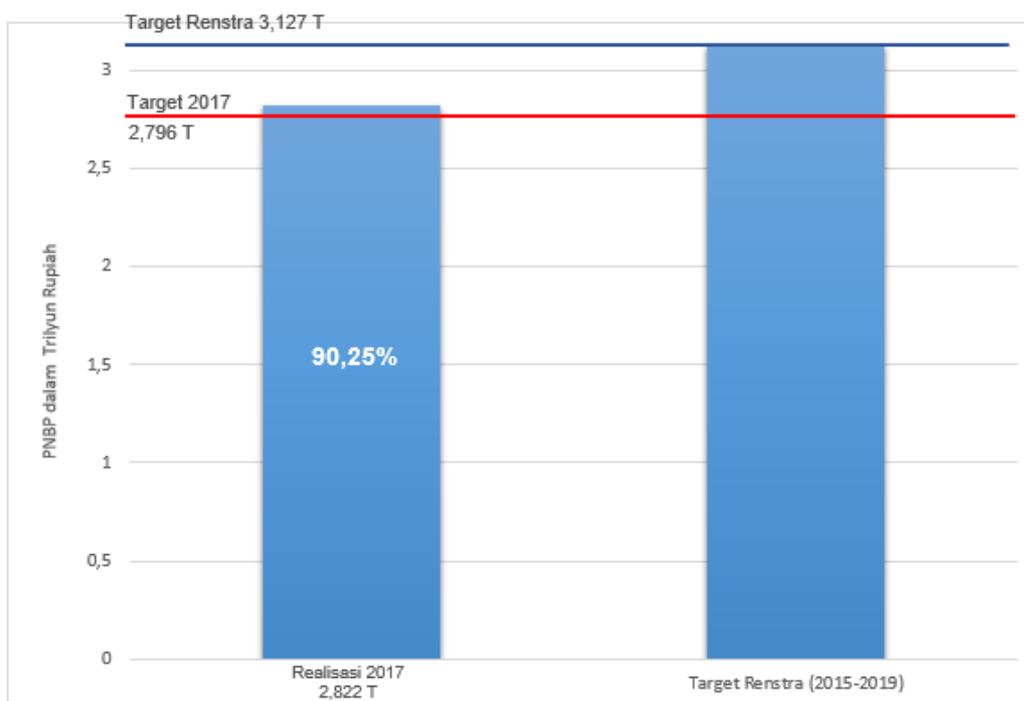
Pagu anggaran APBNP Ditjen PHPL tahun 2017 adalah sebesar Rp448.654.987.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp400.467.306.582,- (**89,26%**) sebagaimana disajikan pada Lampiran 2. Dengan capaian kinerja sebesar **109,02%**, maka berdasarkan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya, capaian kinerja program Ditjen PHPL sebesar **0,82** (rasio input : output = 89,26/109,02) termasuk kategori **efisien** (nilai efisiensi < 1), Tabel 3. Realisasi anggaran dan output tahun 2017 disajikan pada Lampiran 3 dan Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2017 disajikan pada Lampiran 4.

Tabel 3. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

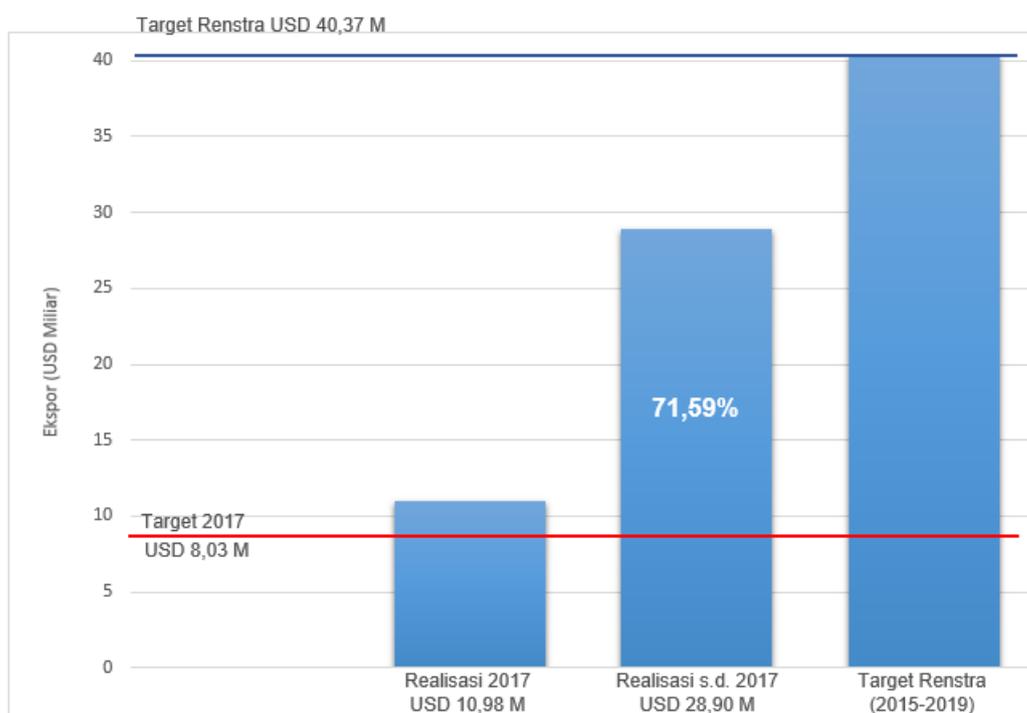
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Input	448.654.987.000	400.467.306.582	89,26
Output	100%	109,02%	109,02
Nilai Efisiensi			0,82
Kategori			Efisien

Jika dibandingkan dengan target Renstra dan IKU (2015-2019) capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL sampai dengan tahun 2017, 3 (tiga) dari 4 (empat) IKP tercapai sesuai target sampai dengan tahun 2017, sebagaimana disajikan pada Gambar 4. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)



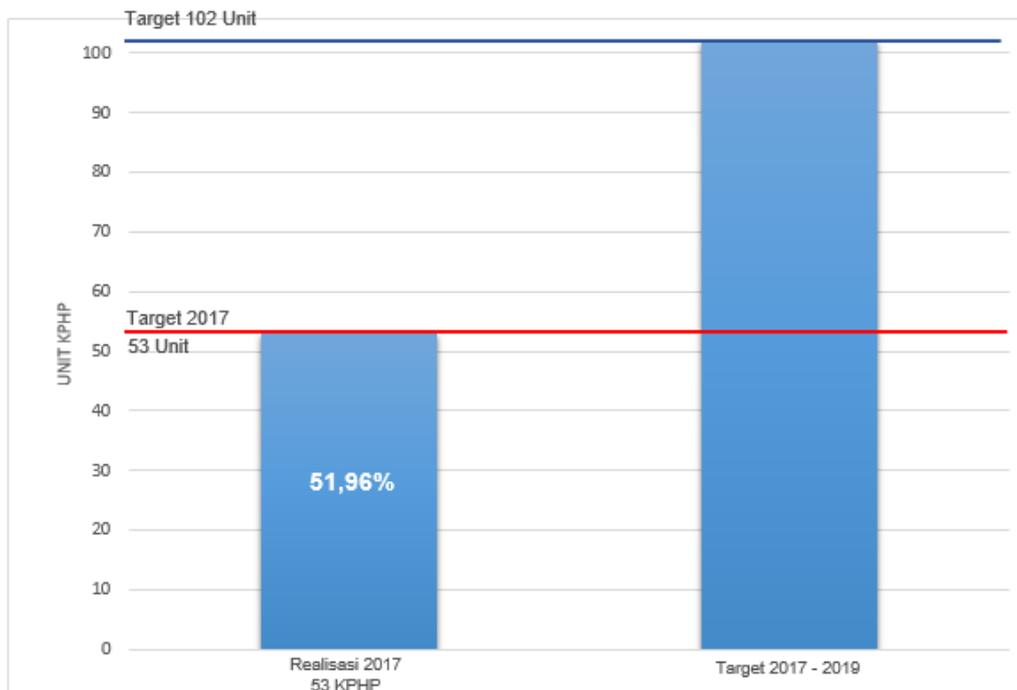
EKSPOR (USD MILIAR)



UNIT KPHP YANG MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN MASYARAKAT



UNIT KPHP YANG DAPAT DILINDUNGI DARI KEBAKARAN HUTAN



Gambar 4. Capaian Indikator Kinerja Program Dibandingkan Target Renstra/IKU Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Sumbangan PNBP dari Hutan Produksi (termasuk Industri)

Indikator Kinerja Program untuk sasaran strategis pertama yaitu jumlah PNBP dari hutan produksi. Pada tahun 2017, target PNBP sebesar Rp. 2,796 Triliun dengan realisasi sebesar Rp. 2,822 Triliun (100,93%). Jika dibandingkan dengan target Renstra (2015-2019) sebesar Rp. 3,127 Triliun, realisasi PNBP tahun 2017 telah mencapai 90,25%.

Tabel 4. Perbandingan Realisasi PNBP Tahun 2015, 2016 dan 2017

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	Tahun 2015 (Rupiah)	Tahun 2016 (Rupiah)	Tahun 2017 (Rupiah)
a. PSDH	1.012.830.957.193,00	827.046.155.417,02	917.669.361.849,00
b. DR	1.879.058.754.798,99	1.617.922.550.561,94	1.712.914.087.182,49
c. IIUPHHK-HA/HT dgn THPB, IIUPHHBK HA dan IIPHHK RE	57.312.538.190,00	128.671.789.122,00	41.285.180.843,00
d. Ganti Rugi Tegakan	0,00	0,00	19.791.592.836,00
e. Penggantian Nilai Tegakan	523.374.564.192,00	44.620.626.945,00	0,00
f. Denda Pelanggaran Eksplorasi Hutan (DPEH)	70.187.190.630,00	52.499.467.249,00	130.705.529.408,00
Jumlah	3.542.764.005.003,68	2.670.760.589.294,96	2.822.365.752.118,49

Realisasi PNBP tahun 2017 naik dibanding tahun 2016, walaupun masih lebih rendah daripada tahun 2015. Penyebab utama turunnya PNBP adalah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/P/HUM/2015 tanggal 29 Mei 2015 Perkara Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014, yang membatalkan pungutan Penggantian Nilai Tegakan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari PSDH, DR dan IIUPHH di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 (yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MenLHK-Setjen/2015), tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksplorasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan dan juga mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.19/PHPL-SET/2015 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan melalui SIMPONI.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Penyesuaian harga patokan hasil hutan kayu, melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT), yang merevisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.68/MENHUT-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH, GRT dan PNT;
- b. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kehutanan. Sampai saat ini konsep revisi PP tersebut telah berada di Biro Keuangan, Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan telah dibahas di Kementerian Keuangan pada tanggal 25 September 2017;
- c. Mempercepat proses integrasi SIMPONI dengan SIPNPB;
- d. Membuat surat edaran yang bertujuan untuk mengoptimalkan PNBPN antara lain:
 1. Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor SE.11/PHPL/IPHH/HPL.4/7/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Kewajiban Melakukan Pembayaran SIPNPB yang Telah Terintegrasi dengan SIMPONI;
 2. Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor SE.7/PHPL/IPHH/HPL.4/7/2017 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi PNBPN;
 3. Surat Edaran Direktur IPHH Nomor SE.1/IPHH/PNBPN/HPL.4/7/2017 tentang Informasi Atas Izin Pemanfaatan Kayu dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Lainnya yang Diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi, beserta Realisasi Kewajiban Pembayaran PNBPN nya.
- e. Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan telah mengirim surat Nomor S.411-S442/IPHH/PNBPN.HPL.4/5/2017 tanggal 18 Mei 2017 kepada Dinas yang membidangi Kehutanan Provinsi untuk :
 1. Melakukan evaluasi atas permasalahan yang menyebabkan realisasi PNBPN masih rendah;
 2. Mengingatn kepada semua Unit Manajemen di wilayah kerjanya agar lebih meningkatkan kinerjanya.
- f. Melakukan sosialisasi ke Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) terkait pembayaran PNBPN melalui SIPNPB yang sudah terintegrasi dengan SIMPONI yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2017;
- g. Ekstensifikasi dan diversifikasi pengenaan PNBPN produksi Hasil Hutan Bukan Kayu;
- h. Peningkatan pengawasan dan pengendalian Wajib Bayar di tingkat tapak (KPHP).

Untuk meningkatkan PNBP sebagaimana diuraikan di atas, Ditjen PHPL melakukan perombakan mekanisme pembayaran kewajiban iuran kehutanan yang signifikan, dari yang sebelumnya *official assessment* menjadi *self assessment*, dengan meluncurkan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP). Dengan SIPNBP, Wajib Bayar dapat segera melakukan proses pembayaran dan pelaporan sesuai dengan kegiatannya tanpa bergantung pada pejabat pemerintah, tanpa hambatan waktu dan tempat, karena semua transaksi berbasis teknologi informasi. Pada saat Wajib Bayar melakukan transaksi, pada saat itu juga transaksi tersebut tercatat pada sistem dan dapat segera dilihat laporannya. Tampilan muka SIPNBP disajikan pada Gambar 5.

Sistem Informasi Manajemen
PNBP - PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan

#	PROVINSI	MURNI				
		DR (x US\$ 1000)	PSDH (x Rp. 1000)	IIUPH-HP (x Rp. 1000)	GRT (x Rp. 1000)	DPEH (x Rp. 1000)
1.	Nangroe Aceh Darussalam	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Sumatera Utara	43.46	150,390.41	0.00	0.00	0.00
3.	Sumatera Barat	1.05	5,515.75	0.00	0.00	0.00
4.	Jambi	9.74	311,379.79	0.00	0.00	0.00
5.	Sumatera Selatan	0.00	441,792.90	0.00	0.00	0.00
6.	Riau	3.36	512,967.65	0.00	0.00	0.00
7.	Bengkulu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Lampung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Bangka Belitung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	DKI Jakarta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Jawa Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Banten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Jawa Tengah	0.00	17,294.26	0.00	0.00	0.00
14.	D.I. Yogyakarta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Informasi PNBP Tahun 2016 s/d 2017

ID Masukan Username Anda Sandi Masukan Password Anda

Gambar 5. Tampilan Muka Sistem Informasi PNBP

SIPNBP merupakan sistem informasi PNBP Sumber Daya Alam pertama yang terintegrasi dengan SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online) Kementerian Keuangan. Inovasi SIPNBP bersama SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu) masuk sebagai Top 10 Sinolinghut 2017 dalam kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan berkesempatan meraih Sinolinghut Award 2017. Pemenang Sinolinghut Award 2017 akan diumumkan pada Hari Bakti Rimbawan 2018.

Keberhasilan meningkatkan sumbangan PNBP juga tidak terlepas dari peran SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) yang sudah terintegrasi dengan SIPNBP. Saat ini SIPUHH telah menjadi sarana utama pelayanan publik bidang penatausahaan hasil hutan yang berlangsung 24 jam penuh, memfasilitasi

lebih dari 3.000 pelaku usaha yang terkait pemanfaatan hasil hutan, simpul distribusi dan industri primer pengolahan kayu. SIPUHH yang dinominasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah meraih prestasi masuk dalam **Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017**, berdasarkan Keputusan MenPANRB Nomor 20 Tahun 2017 dan **Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017**, berdasarkan Keputusan MenPANRB Nomor 40 Tahun 2017.



Gambar 6. SIPUHH Memperoleh Piagam Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017



Gambar 7. SIPUHH Memperoleh Tropi Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017

Inovasi SIPUHH, mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diundang menghadiri Konferensi Internasional "*Innovation in Government : The New Normal*" di Paris atas keberhasilannya masuk dalam Top 99 dan Top 40 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh KemenPANRB, bersama-sama dengan 20 inovasi lainnya dari berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN yang telah memenangkan Top 99 dan Top 40 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sejak tahun 2014 hingga tahun 2017.

Dalam kegiatan tersebut, SIPUHH memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia telah memiliki inovasi-inovasi yang kreatif antara lain dalam tata kelola kehutanan. Konferensi dimaksudkan untuk menyoroti wawasan-wawasan yang didapatkan melalui hasil kerja OPSI (*Observatory Public Service Innovation*) bersama dengan negara-negara yang tergabung dalam OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), dalam mengubah cara mereka beroperasi dan memperbaiki kehidupan masyarakat di negaranya melalui inovasi.



Gambar 8. Tim SIPUHH Menghadiri Konferensi Internasional "*Innovation in Government : The New Normal* " di Paris, Perancis.

Guna meningkatkan tata kelola hutan dan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan pendapatan negara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Ditjen PHPL mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (SIPHPL). Sistem ini mengintegrasikan basis data dari hulu sampai hilir yang selama ini dikelola dalam sistem-sistem informasi yang terpisah. Sistem-sistem tersebut adalah SIPNBP, SIRPBBI (Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Kayu Online), E-Monev (Elektronik Monitoring dan Evaluasi), SILK dan SIPUHH. SIPHPL telah dirilis pada tanggal 29 Agustus 2017 di Jakarta oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian. SIPHPL dapat diakses publik melalui alamat <http://si-phpl.menlhk.go.id>.



Gambar 9. Peluncuran SIPHPL oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Nilai Ekspor Industri Hasil Hutan Kayu

Target ekspor produk industri kehutanan tahun 2017 sebesar USD 8,03 Miliar, dengan realisasi sebesar USD 10,98 Miliar (136,74%). Dibandingkan dengan target sampai dengan tahun 2019 sebesar USD 40,37 Miliar, realisasi sampai dengan tahun 2017 sebesar USD 29,87 Miliar telah mencapai 73,99%. Rincian nilai ekspor produk industri kehutanan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Perbandingan Nilai Ekspor Tahun 2015, 2016 dan 2017

	Ekspor Industri	2015 (USD)	2016 (USD)	2017 (USD)
1	Wood Chip (Serpih kayu)	158.266.877,82	110.952.464,41	91.020.258,61
2	Furniture kayu	1.095.737.363,47	862.783.803,73	1.387.765.952,77
3	Kerajinan	89.007.148,15	66.750.824,99	79.704.952,77
4	Panel	2.582.822.987,23	2.460.468.307,88	2.467.469.902,23
5	Paper	3.162.936.881,54	3.117.149.989,94	3.464.042.099,20
6	Pulp	1.777.902.392,47	1.620.210.530,10	2.365.863.945,49
7	Veneer	39.639.576,63	54.302.143,09	77.530.800,47
8	Woodworking	929.354.796,17	971.857.326,38	1.046.571.903,11
9	Bangunan Prefabrikasi	6.035.626,11	3.593.631,49	3.330.657,82
	Jumlah	9.841.703.649,59	9.268.069.022,01	10.983.300.472,47

(sumber data : Download SILK Online 21 Januari 2018)

Berdasarkan kawasan negara tujuan, nilai ekspor produk industri kehutanan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Perbandingan Ekspor Berdasarkan Kawasan Tahun 2015, 2016 dan 2017

Kawasan Negara	2015 (USD)	2016 (USD)	2017 (USD)
Asia	6.901.930.560,23	6.601.526.154,99	7.827.745.371,11
North America	1.241.952.760,45	996.085.059,15	1.297.171.112,10
European Union	873.247.810,24	869.982.533,76	1.013.951.421,66
Oceania	409.286.450,10	408.897.707,38	439.284.065,32
Africa	315.087.486,10	306.739.041,95	332.658.234,55
South America	71.760.799,03	53.684.036,38	42.010.817,65
Europe	28.435.768,44	31.152.472,40	30.479.450,08
Jumlah	9.841.703.649,59	9.268.069.022,01	10.983.300.472,47

(sumber data : Download SILK Online 21 Januari 2018)

Tingginya capaian kinerja nilai ekspor produk industri kehutanan berkaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan, dimana terdapat produk industri kehutanan yang sebelumnya termasuk dalam kelompok B (tidak wajib dilengkapi dokumen V-Legal), maka mulai tanggal 15 Mei 2017 termasuk dalam kelompok A (wajib dilengkapi dokumen V-Legal). Kerjasama Indonesia dengan komunitas negara yang tergabung dalam Uni Eropa mencapai puncaknya dengan diberlakukannya FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) License pada tanggal 15 November 2016 yang ditandai dengan kegiatan *first shipment* ke negara anggota Uni Eropa. Dokumen V-Legal/dokumen FLEGT yang diterbitkan oleh LVLK (Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu) dikirimkan melalui Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang dikelola Ditjen PHPL. Dengan adanya SILK, diharapkan kegiatan ekspor produk industri kehutanan yang bersertifikat semakin meningkat.

Pada tanggal 30 November 2017 di Jakarta, Ditjen PHPL bekerja sama dengan MFP 3 menyelenggarakan acara "Refleksi Satu Tahun Lisensi FLEGT" untuk berbagi informasi dari kedua belah pihak (Indonesia dan Uni Eropa) tentang pencapaian, peluang dan tantangan setahun pemberlakuan Lisensi FLEGT Indonesia dalam optimalisasi pemanfaatannya. Selain itu, peringatan ini juga menjadi momentum untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Lisensi FLEGT Indonesia selama setahun terakhir. Diharapkan kegiatan ini dapat berkontribusi dalam :

1. Promosi pasar domestik dan internasional tentang komitmen Indonesia untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan hutan melalui perdagangan kayu legal dan bersertifikat;
2. Meningkatkan kesadaran pasar domestik mengenai pentingnya mengkonsumsi atau membeli produk kayu legal bersertifikat untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia;

3. Mengajak publik nasional maupun internasional untuk turut berkontribusi dalam menjaga kredibilitas SVLK, Lisensi FLEGT Indonesia, dan memberikan pembelajaran positif untuk penyempurnaan sistem;
4. Mencari solusi bersama untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan Lisensi FLEGT Indonesia.

Acara ini secara resmi dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dalam kesempatan ini disampaikan informasi bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang terkumpul secara online, sejak 15 November 2016 s/d 15 November 2017, Indonesia telah menerbitkan 39.078 dokumen Lisensi FLEGT untuk ekspor produk kayu ke Uni Eropa dengan nilai ekonomi sebesar USD 1.005.109.923. Data ini merefleksikan peningkatan ekspor produk kayu Indonesia dibandingkan periode yang sama sebelumnya yaitu 15 November 2015 – 14 November 2016 sebesar USD 852.042.344.



Gambar 10. Refleksi Satu Tahun Lisensi FLEGT, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta

Momentum satu tahun Lisensi FLEGT Indonesia sepatutnya diperingati agar publik nasional dan internasional dapat mengetahui capaian Indonesia dalam bidang sertifikasi hutan dan legalitas kayu melalui sistem yang dikembangkan di atas. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan apresiasi SVLK di pasar dunia di luar Uni Eropa. Selain itu, capaian satu tahun Lisensi FLEGT ini juga patut dijadikan momentum

untuk menilai dan mengevaluasi seluruh rangkaian pelaksanaan penerbitan Lisensi FLEGT selama setahun terakhir, agar benar-benar memberikan dukungan bagi upaya penanggulangan perdagangan kayu ilegal dan peningkatan perdagangan kayu legal, disamping peningkatan ekspor produk kehutanan ke pasar dunia.

Upaya-upaya lainnya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai ekspor produk industri kehutanan diantaranya :

1. Pada tanggal 26 Oktober 2017 telah dilaksanakan pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia yang dipimpin Dirjen PHPL dengan Dr. Watanabe Tsuyoshi, Dirjen Kehutanan pada Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries - MAFF). Pertemuan tersebut menegaskan posisi SVLK Indonesia dalam kerangka pemenuhan implementasi sistem "*Clean Wood Act*" pemerintah Jepang, dalam rangka mendukung upaya pencegahan pembalakan liar dan meningkatkan perdagangan kayu legal. *Clean Wood Act* mengatur legalitas kayu yang diimpor ke Jepang dengan menerapkan tingkat uji tuntas/kelayakan (*due diligence*) yang lebih ketat.



Gambar 11. Seminar Bertajuk Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia dan "*Clean Wood Act*" di Tokyo, Jepang.

2. Pada tanggal 22 November 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipimpin oleh Dirjen PHPL, melakukan *road show* dalam rangka promosi FLEGT License di London. Kegiatan promosi dan workshop diselenggarakan di Kedutaan Besar RI di London, yang dihadiri oleh kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang terdiri dari wakil pemerintah Inggris dan Spanyol, eksportir, importir, Asosiasi Pengusaha (*Timber Trade Federation*), dan LSM;
3. Keberpihakan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pemenuhan SVLK ditunjukkan dengan komitmen Ditjen PHPL untuk memfasilitasi SVLK bagi UMKM sejak tahun 2013. Ditjen PHPL memandang UMKM sebagai salah satu kontributor penting dalam kinerja ekspor, sehingga perlu lebih dipacu kepercayaan dirinya untuk bisa bersaing di pasar Internasional yang

mempersyaratkan legalitas kayu, melalui kepemilikan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK). Kesungguhan Ditjen PHPL dalam mendukung UMKM untuk tertib aturan dan berdaya saing, menggugah Bappenas untuk menjadikan 'Fasilitasi SVLK bagi UMKM' sebagai program Prioritas Nasional 2018, dengan mengelola sejumlah anggaran untuk fasilitasi SVLK bagi 150 kelompok UMKM (± 750 Unit UMKM).

Berbagai upaya yang dilakukan sebagaimana uraian di atas, membuahkan prestasi untuk SILK. SILK sebagai suatu sistem informasi elektronik untuk mendukung prinsip transparansi, keterwakilan dan perbaikan tata kelola dalam pelaksanaan SVLK, berkesempatan meraih Sinolinghut Award 2017 bersama 9 (sembilan) inovasi terbaik lainnya.

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam memberantas praktek-praktek ilegal dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sekaligus mendukung perdagangan kayu legal, mengantarkan Direktur Jenderal PHPL, Putera Parthama, PhD sebagai Chair of EGILAT (*Expert Group on Illegal Logging and Associated Trade*) 2018-2019, menggantikan Dr. Ruth Turia (Papua Nugini).

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kerjasama KPHP dalam Memproduksi Barang dan Jasa

Peningkatan pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak bersama masyarakat merupakan salah satu dari beberapa kebijakan yang telah diambil oleh Ditjen PHPL untuk membangkitkan kembali iklim usaha pada hutan produksi di masa yang akan datang, dengan melaksanakan :

- 1) Mendorong percepatan operasionalisasi KPHP, sebagai wujud pengelolaan hutan berbasis tapak, bersama Pemerintah Daerah Provinsi, akademisi dan NGO;
- 2) Multibisnis KPHP sebagai wujud pengelolaan hutan berbasis masyarakat;
- 3) Diversifikasi produk dari hutan produksi melalui pengembangan HHBK dan jasa lingkungan.

Target jumlah unit KPHP yang melakukan kerjasama dalam memproduksi barang dan jasa adalah 63 unit KPHP dengan realisasi sebesar 62 unit KPHP (98,41%). Berdasarkan Rencana Kerja Ditjen PHPL tahun 2017, indikator kinerja jumlah KPHP yang melakukan kerjasama pengelolaan hutan produksi baru ditargetkan pada tahun 2017, dan capaian pada tahun 2017 (62 unit) adalah sebesar 46,62 % dibandingkan target sampai dengan tahun 2019 (133 unit). Daftar KPHP yang melakukan kerjasama pengelolaan hutan produksi disajikan pada Lampiran 6.

Fasilitasi KPHP oleh BPHP Wilayah VIII Pontianak tidak terlaksana pada KPHP Unit

XVIII dan XIX Kapuas Hulu di wilayah Kalimantan Barat dikarenakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPH yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Kalimantan Barat, wilayah kerjanya tidak sesuai dengan unit wilayah kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Upaya yang telah dilakukan BPHP Wilayah VIII Pontianak selama masa transisi kebijakan pemerintah, diantaranya adalah :

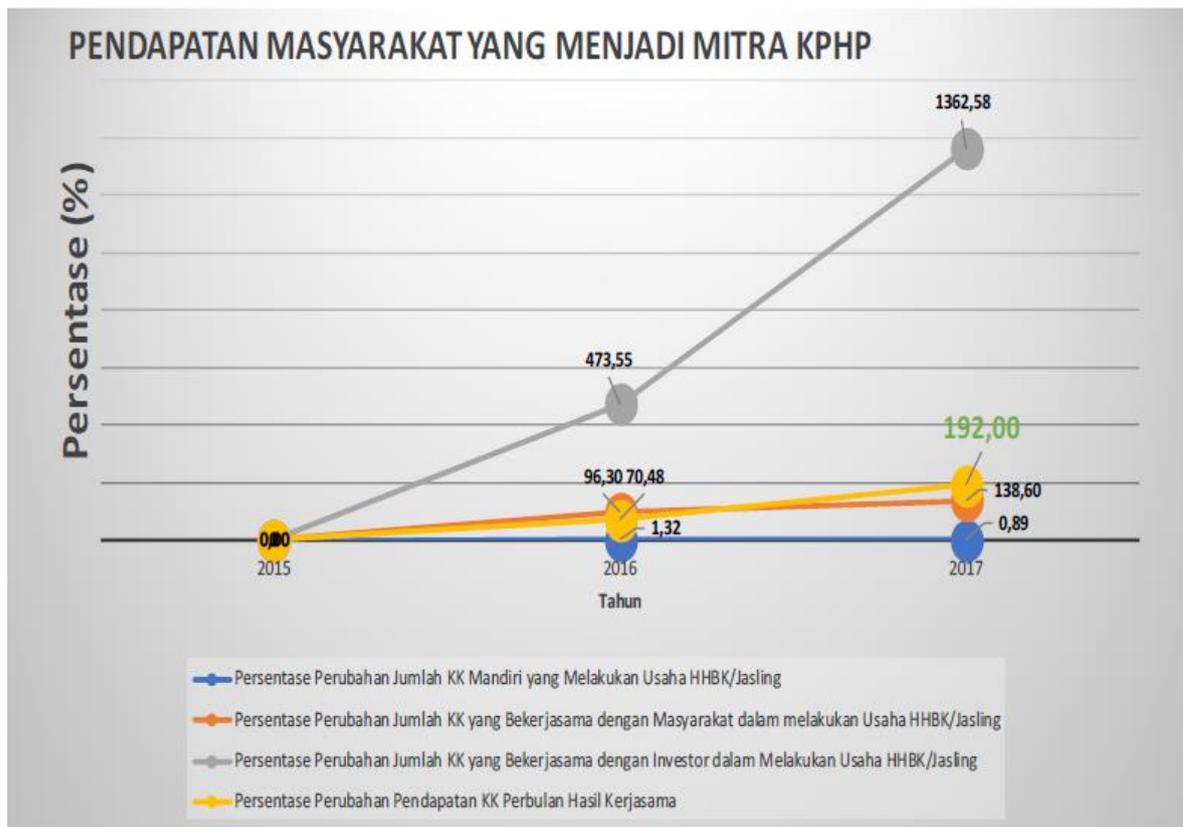
1. Berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi melalui Dinas Kehutanan Provinsi;
2. Berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak – Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Berkoordinasi dengan Direktur Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan – Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
4. Berkoordinasi dengan Direktur KPHP – Ditjen PHPL.

Hasil olah data kemandirian KPHP oleh Direktorat KPHP terhadap 40 (empat puluh) KPHP, menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat/Kepala Keluarga (KK) yang menjadi mitra KPHP, sebagaimana disajikan pada Tabel 7 dan Gambar 12.

Tabel 7. Peningkatan Pendapatan Masyarakat yang Menjadi Mitra KPHP (40 KPHP)

No	Indikator	Tahun	2015	2016	2017
1	Perubahan Jumlah KK Mandiri yang Melakukan Usaha HHBK/Jasling	Jumlah	29.431	29.820	29.693
		% perubahan	0	1,32	0,89
2	Perubahan Jumlah KK yang Bekerjasama dengan Masyarakat dalam melakukan Usaha HHBK/Jasling	Jumlah	4.487	8.808	10.706
		% perubahan	0,00	96,30	138,60
3	Perubahan Jumlah KK yang Bekerjasama dengan Investor dalam Melakukan Usaha HHBK/Jasling	Jumlah	155	889	2.267
		% perubahan	0	473,55	1.362,58
4	Perubahan Pendapatan KK Perbulan Hasil Kerjasama	Jumlah	26.250.000	44.750.000	76.650.000
		% perubahan	0,00	70,48	192,00

*) Survei dilaksanakan pada bulan September 2017



Gambar 12. Grafik Pendapatan Masyarakat yang Menjadi Mitra KPHP

Kisah sukses kerja sama KPHP dengan masyarakat diantaranya :

1. KPHP Kendilo

Kerja keras dan semangat yang tidak pernah padam masyarakat desa Suweto Kabupaten Paser bermitra dengan KPHP Kendilo membuahkan hasil panen perdana padi ladang pada bulan Mei 2017. Panen padi perdana yang menjadi hari bersejarah bagi masyarakat desa Suweto dihadiri oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, Ditjen PHPL dan jajaran, beserta Bappenas. KPHP Kendilo berada pada wilayah kerja BPHP Wilayah XI Samarinda.

Masyarakat desa Suweto memulai melakukan penanaman padi ladang pada bulan November 2016. Desa binaan KPHP Kendilo ini juga dirancang sebagai desa mandiri energi melalui energi terbarukan biomassa.



Gambar 13. Kegiatan Tanam dan Panen Padi Ladang di Desa Suweto, KPHP Kendilo

2. KPHP Boalemo

KPHP Boalemo bersama masyarakat Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo mewujudkan Masyarakat Desa Mandiri dengan mengolah nira Aren menjadi bioetanol. Potensi pohon Aren yang melimpah di Kabupaten Boalemo sekitar 15.000 pohon tumbuh alami dengan produktivitas yang cukup tinggi, dapat menghasilkan 15 - 20 liter nira Aren untuk setiap pohonnya. Apabila diolah menghasilkan 24.000 liter etanol sebagai bahan baku bioetanol. KPHP Boalemo berada pada wilayah kerja BPHP Wilayah XII Palu.

Masyarakat telah membuktikan bahwa bioetanol nira Aren sangat prospektif dan sangat membantu masyarakat pedesaan.



Gambar 14. Bioetanol Produksi KPHP Boalemo

3. KPHP Batulanteh

Masyarakat desa Batu Dulang dan desa Pelat Kabupaten Batulanteh Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Jaringan Madu Hutan Indonesia sukses membangun Sentra Pembelajaran Lebah. Sentra Pembelajaran Lebah/Pusat Pembelajaran Produk Hasil Hutan Madu Sumbawa, mulai dari proses panen (sistem panen lestari) hingga pasca panen. Madu yang sangat terkenal adalah madu Trigona yang dihasilkan dari lebah *Trigona Sp* yang mempunyai khasiat luar biasa karena mengandung propolis lebih tinggi dari pada madu biasa.

Dalam menampung dan memfasilitasi pemasaran produk madu Trigona, KPHP Batulanteh telah bekerjasama dengan berbagai pihak. Pengemasan madu Trigona telah dilakukan dengan label produk "SUMBAWA BLACK HONEY". KPHP Batulanteh berada pada wilayah kerja BPHP Wilayah VII Denpasar.



Gambar 15. Lebah Hutan dan Produksi Madu KPHP Batulanteh

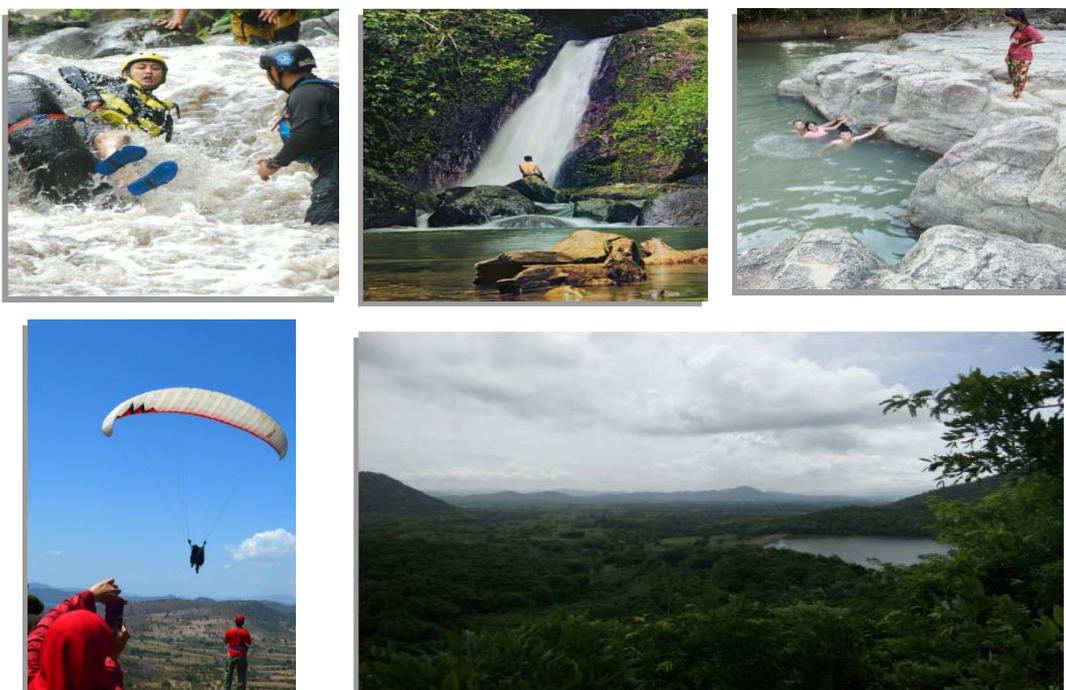
Saat ini, pengelolaan hutan di tingkat tapak oleh KPHP telah menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan produktifitas hutan. Hal ini dikarenakan dalam operasionalisasinya, KPHP melibatkan kelompok masyarakat sebagai mitra strategis. Berbagai contoh produk KPHP lainnya dapat dilihat pada Gambar 16.



Gambar 16. Beberapa Produk KPHP Berbasis Usaha Masyarakat di Wilayah KPHP

Selain mengembangkan produk HHBK, Ditjen PHPL juga gencar mengangkat potensi jasa lingkungan dengan mengembangkan rintisan wisata alam, diantaranya:

- Wisata alam gunung lumut di KPHP Gunung Duren Provinsi Bangka Belitung;
- Wisata alam Desa Golo Damo, Areal Puarlolo, UPT. KPHP Wilayah Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Wisata alam desa ekowisata Marente, Pernek, Songkar, Pelat, dan Batu Dulang di KPHP Batulanteh Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Gambar 17. Wisata Alam Desa Ekowisata di KPHP Batulanteh

Upaya-upaya yang dilakukan Ditjen PHPL pada tahun 2017 untuk mengangkat produk KPHP diantaranya :

1. Pelatihan Implementasi Kewirausahaan bagi jajaran pengelola KPHP, bertujuan untuk membekali para peserta dengan kemampuan bisnis seperti perencanaan dan strategi bisnis, kemampuan melihat peluang bisnis, dan penyusunan rencana pengelolaan usaha serta aplikasinya. Pelatihan Kewirausahaan diselenggarakan pada tanggal 15-18 Mei 2017, bekerjasama dengan *Multistakeholder Forestry Programme 3* (MFP 3). Pelatihan yang mengambil tema "Membangun Jiwa Kewirausahaan Menuju Kemandirian KPHP", diikuti oleh peserta dari 13 (tiga belas) Provinsi;
2. Berperan serta pada Pameran Lingkungan Hidup dan Ekowisata yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar RI di Tokyo, pada tanggal 21-25 Oktober 2017, bertempat di Asean Japan Center. Pada pameran tersebut dipamerkan produk HHBK dari KPHP Limau, KPHP Batulanteh, KPHP Boalemo, KPHP Gorontalo, KPHP Kerinci dan KPHP Sivia Patuju. Pameran Lingkungan Hidup dan Ekowisata ini merupakan sebuah langkah dalam menciptakan dan membuka pasar ekspor produk HHBK;
3. Menyelenggarakan berbagai macam pelatihan yang difasilitasi oleh Ditjen PHPL melalui BPHP diantaranya:
 - Pelatihan pengelolaan bambu;
 - Pelatihan budi daya rotan;
 - Pelatihan budi daya lebah madu dan pengolahan mutu madu;
 - Pelatihan teknik pemanenan getah pinus;
 - Pelatihan budi daya aren dan pengolahan pasca panen.
4. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis masyarakat dalam mendukung kemandirian KPHP dengan membuka peluang pasar bagi produk KPHP. Kerjasama pemanfaatan hutan pada KPHP diimplementasikan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kesepakatan Bersama Dirjen PHPL dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Percepatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Masyarakat di Wilayah KPH Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nota kesepahaman juga telah ditandatangani Dirjen PHPL dengan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Percepatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Masyarakat di Wilayah KPH Provinsi Sulawesi Tengah.

Kerjasama pemanfaatan hutan pada KPH non perizinan mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2017 tanggal 7 September 2017 yang memberikan ruang kepada KPHP

untuk membangun kerja sama dengan berbagai pihak (perorangan, kelompok masyarakat setempat, BUM Desa, Koperasi setempat, UMKM, BUMD, BUMN dan BUMSI).



Gambar 18. Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPH Non Perizinan Mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/Menlhk/Setjen /Kum.1/9/2017

Sasaran Kegiatan 4 : Menurunnya Luas Areal Kebakaran Hutan Produksi

Pencegahan bahaya kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu penyebab tingginya degradasi hutan dan lahan, merupakan tanggung jawab seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ditjen PHPL bertanggung jawab mencegah kebakaran di wilayah hutan produksi, yang dalam pelaksanaannya melibatkan pengelola di tingkat tapak (KPHP).

Target jumlah unit KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran adalah 53 unit KPHP dengan realisasi sebanyak 53 unit KPHP (100 %), pada 6 (enam) provinsi (Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua). Berdasarkan Rencana Kerja Ditjen PHPL tahun 2017, indikator kinerja jumlah KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran baru ditargetkan pada tahun 2017, dan capaian pada tahun 2017 (53 unit) adalah sebesar 51,96 % dibandingkan target sampai dengan tahun 2019 (102 unit).

Tidak tercapainya target disebabkan karena fasilitasi kegiatan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat dilaksanakan sebanyak 6 (enam) unit KPHP, yaitu pada KPHP Unit X Merakai, KPHP Unit XVIII dan Unit XIX Kapuas Hulu, KPHP Unit XXIII Menukung, KPHP Unit XXIV Sokan, KPHP Unit XXV Belimbing, KPHP Unit XXXII Kendawangan Ketapang. Namun target kinerja program dapat dipenuhi dengan tambahan lokus KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran pada Provinsi Kalimantan Tengah. Penambahan lokus ini dimungkinkan karena kelembagaan KPHP di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah telah terbentuk sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017. Tambahan lokus tersebut adalah KPHP Unit X Kapuas Hulu, KPHP Unit XI Kapuas Tengah, KPHP Unit XVII Katingan Hulu, KPHP Unit XXX Katingan Hilir, KPHP Unit XIX Mentaya Hulu-Seruyan Tengah dan KPHP Unit VIII Barito Tengah. Daftar KPHP yang difasilitasi dari ancaman kebakaran dapat dilihat pada Lampiran 7.

Kegiatan terkait pengendalian kebakaran yang dilaksanakan di wilayah KPHP, antara lain:

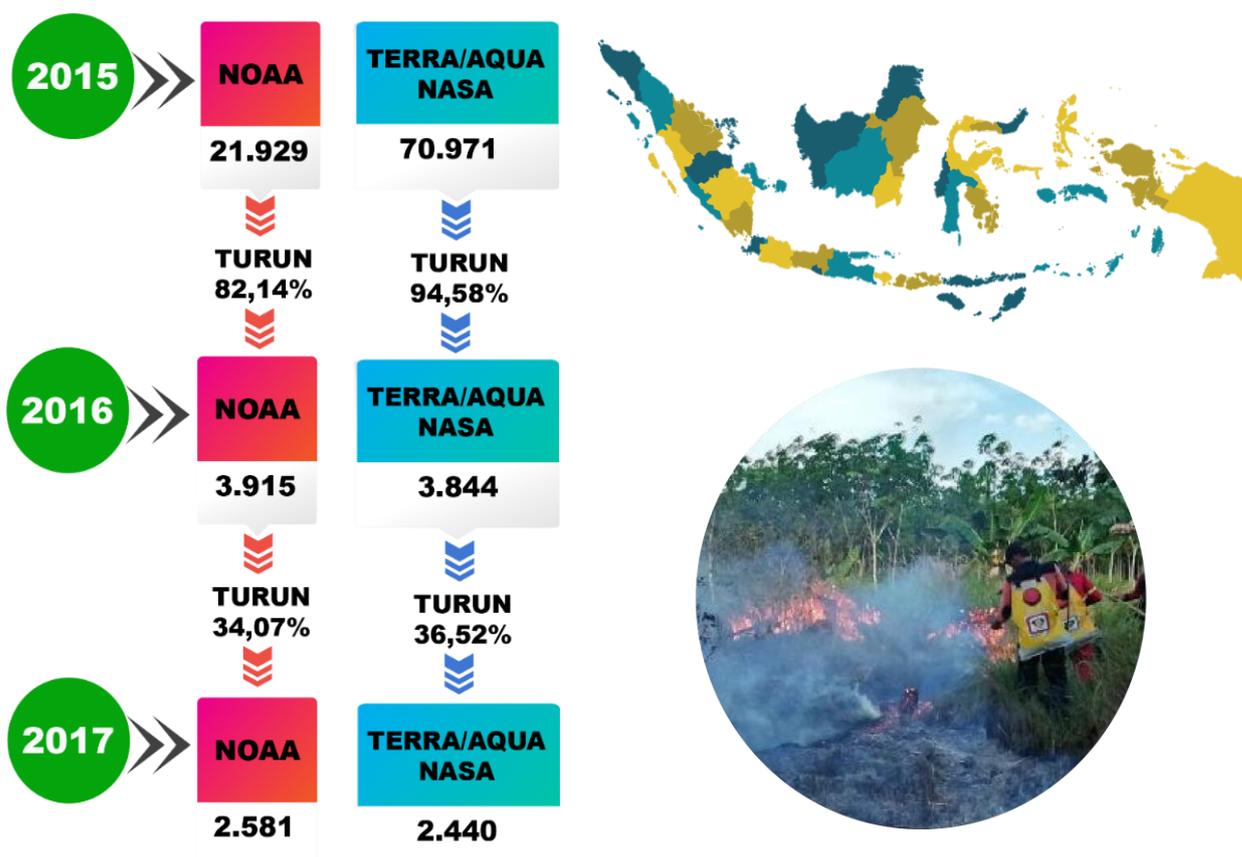
- a. Sosialisasi dalam rangka pengendalian kebakaran hutan yang dinilai rawan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan berdasarkan data hot spot tahun sebelumnya dengan melibatkan aparatur desa, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat;
- b. Patroli pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan pada lokasi yang secara spesifik dinilai rawan terhadap ancaman karhutla. Dalam kegiatan patroli juga didata sumber-sumber air yang tidak kering pada musim kemarau sehingga nanti dapat digunakan pada saat pemadaman dan meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan pada lokasi tersebut;
- c. Pengaktifan posko siaga karhutla yang dioperasikan pada hari libur guna mengantisipasi laporan maupun kejadian karhutla;
- d. Melakukan pemantauan hotspot dan pengecekan secara langsung (*ground check*) di lapangan dan memberikan bantuan sarana dan prasarana.

Selama kurun waktu 2015-2017, jumlah hotspot menurun cukup signifikan, yaitu dari 21.929 titik di tahun 2015, 3.915 titik di tahun 2016, hingga 2.581 titik di tahun

2017 (satelit NOAA). Begitu pula dengan data satelit Terra/Aqua (NASA) confidence level >80%, menunjukkan penurunan dari 70.971 titik di tahun 2015, 3.844 titik di tahun 2016, dan 2.440 titik di tahun 2017, seperti ditunjukkan dalam Gambar 19. Secara umum di tahun 2017, kurang lebih 35% jumlah hotspot menurun dari tahun 2016, dan sekitar 16,99% diantaranya terjadi di hutan produksi yang dikelola oleh KPHP.

PERBANDINGAN JUMLAH TITIK HOTSPOT PADA TAHUN 2015 – 2017

DATA MENGGUNAKAN SATELIT NOAA DAN TERRA/AQUA NASA CONFIDENCE LEVEL > 80%



Gambar 19. Perbandingan Jumlah Titik *Hotspot* pada Tahun 2015-2017

Tentunya keberhasilan ini merupakan kerjasama semua pihak dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla, khususnya di tingkat tapak yang melibatkan masyarakat.

B. Realisasi Anggaran

Pagu APBN Ditjen PHPL tahun 2017 sesuai Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp489.724.426.000,-. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017, dan sesuai surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S.1515/AG/2017 tanggal 10 Agustus 2018 hal Pengesahan Revisi APBNP Tahun 2017, pagu APBNP Ditjen PHPL mengalami efisiensi menjadi sebesar Rp448.654.987.000,-. Efisiensi penghematan anggaran ini tidak mengakibatkan perubahan pencapaian target kinerja, sehingga tidak perlu dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja.

Realisasi anggaran per 13 Januari 2018 berdasarkan sumber data <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id> dari Kementerian Keuangan, adalah sebesar Rp400.467.306.582,- (89,26%). Perbandingan pagu anggaran dan realisasi dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015, 2016 dan 2017

Tahun	Pagu (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)
2015	499.312.067.000	433.616.443.320	86,84
2016	330.203.298.000	266.948.644.961	80,84
2017	448.654.987.000	400.467.306.582	89,26

Realisasi anggaran per kegiatan dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan.

Kegiatan	Pagu (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persen (%)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	47.786.000.000	47.814.503.641	100,06
Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	9.592.482.000	7.099.641.451	74,01
Peningkatan Usaha Hutan Produksi	6.532.000.000	6.446.434.638	98,69
Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	5.515.000.000	5.481.220.030	99,39
Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	4.948.000.000	4.844.660.129	97,49
Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	6.415.000.000	6.253.942.638	97,49
Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan	367.866.505.000	322.526.904.055	87,67
Jumlah	448.654.987.000	400.467.306.582	89,26

Realisasi anggaran tahun 2017 sebesar 89,26% mengalami peningkatan dari tahun 2015 dan tahun 2016. Realisasi anggaran pada kegiatan Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi dan kegiatan Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan tidak mencapai 90%, sehingga mempengaruhi capaian realisasi anggaran secara keseluruhan menjadi di bawah 90%.

Realisasi anggaran pada kegiatan Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi yang dilaksanakan oleh Direktorat KPHP, hanya mencapai 74,01%. Pada pagu Direktorat KPHP terdapat pagu Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp3.556.082.000,- yang bobotnya mencapai 37% dari pagu Direktorat KPHP. Pagu HLN tersebut hanya terealisasi 29,91%, dikarenakan proses konsultasi dan birokrasi dengan World Bank terkait rencana pelaksanaan kegiatan, memerlukan waktu sampai 8 (delapan) bulan, sehingga tidak cukup waktu selanjutnya untuk proses pengadaan barang/jasa. yang juga harus ditempuh dengan mekanisme World Bank, yang memerlukan waktu sekitar 5 (lima) bulan.

Realisasi anggaran pada kegiatan Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan, hanya mencapai 87,67%, dikarenakan anggaran untuk operasionalisasi KPHP pada Provinsi Kalimantan Barat, yang melekat pada anggaran BPHP Wilayah VIII Pontianak tidak dapat direalisasikan.

Realisasi anggaran pada kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, Ditjen PHPL mencapai 100,06% dikarenakan terdapat pagu minus Belanja Pegawai dan sampai dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, sedang dalam proses revisi Pagu Minus ke Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Langkah-langkah kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan capaian realisasi anggaran tahun 2018 antara lain:

1. Melakukan pembinaan kepada seluruh jajaran Ditjen PHPL untuk bersinergi dan meningkatkan koordinasi internal maupun dengan pihak terkait lainnya;
2. Meningkatkan monitoring secara berkala terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran lingkup Ditjen PHPL;
3. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran sebaik mungkin, bersama dengan para pelaksana kegiatan di lapangan dengan melibatkan pihak terkait, dan berupaya melaksanakan kegiatan secara konsisten sesuai dengan rencana.

C. Capaian Outcome Program

Berdasarkan analisis capaian 4 (empat) Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL dan Indikator Kinerja Kegiatan lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa outcome dari Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan pada tahun

2017 telah tercapai, yaitu:

1. Meningkatnya Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Devisa dan Penerimaan Negara, dimana pada tahun 2017 target PNBPN sebesar Rp2,796 Triliun dengan realisasi sebesar Rp2,822 Triliun (100,93%), sedangkan devisa kehutanan dari target sebesar USD 8,03 Miliar telah tercapai sebesar USD 10,98 Miliar (136,74%);
2. Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari dimana pada tahun 2017 jumlah KPHP yang melakukan kerja sama dalam memproduksi barang dan jasa dapat direalisasikan sebanyak 62 KPHP dari target 63 KPHP (98,41%) dan jumlah KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran mencapai 53 KPHP dari target 53 KPHP (100%).

Sebagaimana disajikan pada Lampiran 4, IKK Ditjen PHPL tahun 2017 adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) IKK. IKK yang realisasinya $\geq 100\%$ sebanyak 19 (sembilan belas) IKK (67,86%), sedangkan IKK yang tidak mencapai 100% sebanyak 9 (sembilan) IKK (32,14%). Sebanyak 7 (tujuh) IKK realisasi sampai dengan tahun 2017 sudah memenuhi/melebihi target Renstra tahun 2015-2019.

D. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

1. Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2016

Berdasarkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap tahun AKIP Ditjen PHPL dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan hasil evaluasi tersebut telah disampaikan melalui surat nomor SP.78/ITJEN/ ITWIL.3/RHS/WAS/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 hal Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja pada Ditjen PHPL Tahun 2016, dimana nilai Implementasi SAKIP Ditjen PHPL tahun 2016 adalah sebesar 70,60. Dalam LHE tersebut, Inspektorat Jenderal memberikan beberapa rekomendasi untuk peningkatan kualitas AKIP Ditjen PHPL, sebagai berikut:

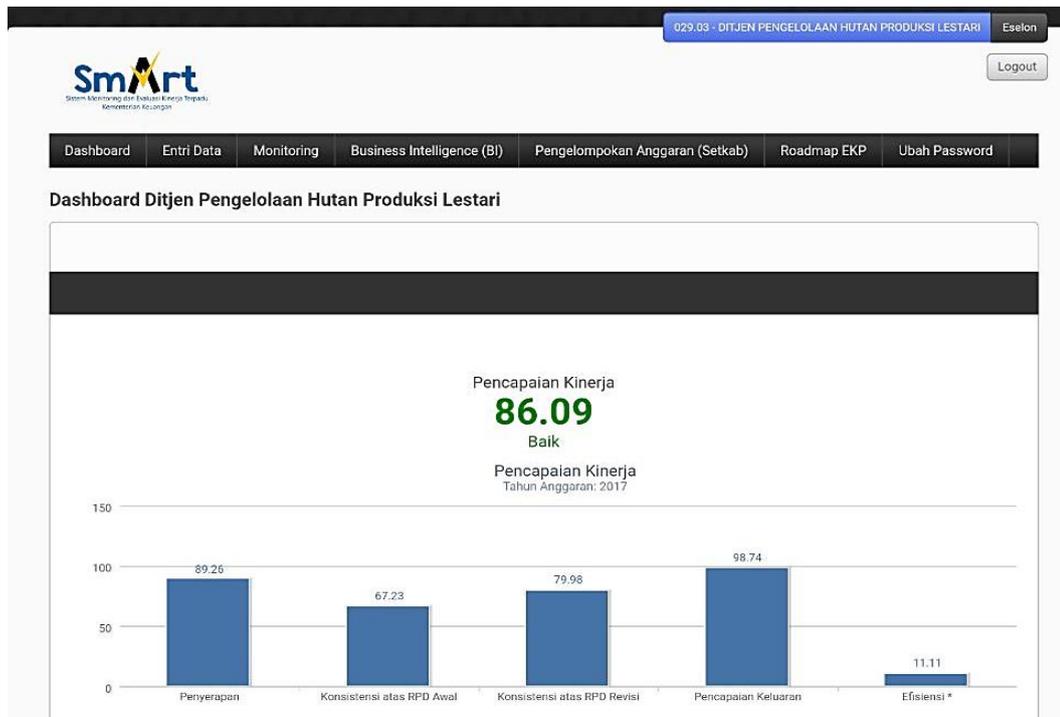
- a. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi internal;
- b. Meningkatkan penyajian dan pemanfaatan informasi kinerja; dan
- c. Meningkatkan pencapaian sasaran/kinerja organisasi lingkup Ditjen PHPL.

2. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2016

Berdasarkan rekomendasi yang tertuang dalam LHE, Ditjen PHPL telah melaksanakan langkah - langkah perbaikan sebagai berikut:

a. Evaluasi lingkup Ditjen PHPL dilaksanakan melalui :

- 1) Pertemuan dengan kepala satker pusat dan BPHP baik secara langsung maupun melalui *video conference*, untuk membahas kemajuan pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan strategi pencapaian kinerja. Pertemuan di pusat dilaksanakan pada tanggal 11 September 2017 dan 21 Desember 2017. Pertemuan dengan kepala BPHP dilaksanakan berturut-turut pada tanggal 2 Juni 2017, 25 Agustus 2017 (*vicom*), 29 Agustus 2017, dan 22 September 2017 (*vicom*);
- 2) Setiap satker lingkup Ditjen PHPL telah membentuk Tim Satgas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan pada awal tahun menyusun Desain Penyelenggaraan SPIP yang didalamnya memuat risiko-risiko yang teridentifikasi signifikan dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi dan upaya pengendaliannya. Tim Satgas melaksanakan pemantauan rutin setiap Triwulan. Pemantauan dilaksanakan untuk melihat seberapa jauh upaya pengendalian yang ditetapkan cukup efektif untuk mengendalikan risiko signifikan di setiap satker;
- 3) Pemantauan dan evaluasi kinerja kegiatan dan anggaran juga dilaksanakan melalui sistem informasi yang difasilitasi Kementerian Keuangan pada alamat <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id> (SMART) dan yang difasilitasi Bappenas pada alamat <http://monev.bappenas.go.id> (Monev Bappenas). Melalui aplikasi SMART, kinerja masing-masing satker diukur berdasarkan formula kombinasi antara penyerapan anggaran, konsistensi penarikan dana, capaian keluaran, dan efisiensi. Berdasarkan hal tersebut, Ditjen PHPL memperoleh nilai kinerja sebesar 86,09 (BAIK), sebagaimana disajikan pada Gambar 20.



Gambar 20. *Dashboard* Monev Anggaran (Aplikasi SMART) Kinerja Ditjen PHPL

Sedangkan capaian kinerja Program Ditjen PHPL berdasarkan Monev Bappenas untuk 7 (tujuh) Kegiatan adalah sebagaimana Gambar 21.

e-Monev PP 39 Beranda Pemantauan Logout

Pemantauan Program / Pemantauan Kegiatan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Kode dan Nama Program: [029.03.06] Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan
 Outcome Program: [029.03.06.03] Meningkatkan pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari

Keterangan Status: ● Baik, ● Hati-hati, ● Buruk, ⊕ Belum Melapor

Kode dan Nama Kegiatan	Anggaran(Rp)			Status Capala Anggaran	Kinerja(%)		Status Capala Kinerja	Set Tar	Realisa
	Pagu	Target	Realisasi		Target	Realisa			
[5396] Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan hutan Produksi Lestari	47.786.000.00	47.786.000.00	47.431.421.82 [99.26 %]	●	100.00 %	100.00 %	●	Target	Realisa
[5397] Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	9.592.482.00	9.592.482.00	7.099.641.451 [74.01 %]	●	100.00 %	154.65 %	●	Target	Realisa
[5398] Peningkatan Usaha Hutan Produksi	6.532.000.00	6.532.000.00	6.446.434.636 [98.69 %]	●	100.00 %	104.71 %	●	Target	Realisa
[5399] Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	5.515.000.00	5.515.000.00	5.481.220.030 [99.39 %]	●	100.00 %	136.99 %	●	Target	Realisa
[5400] Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	4.948.000.00	4.948.000.00	4.844.669.129 [97.91 %]	●	100.00 %	95.44 %	●	Target	Realisa
[5401] Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	6.415.000.00	6.415.000.00	6.253.942.636 [97.49 %]	●	100.00 %	206.12 %	●	Target	Realisa
[5402] Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan	367.866.505.0	367.866.505.0	322.526.904.0 [87.67 %]	●	100.00 %	99.38 %	●	Target	Realisa
TOTAL	448.654.987.4	448.654.987.4	400.084.233.7 [89.17 %]		100.00 %	102.65 %			

Refresh PDF Excel Halaman 1 dari 1 Baris 1 - 7 dari 7

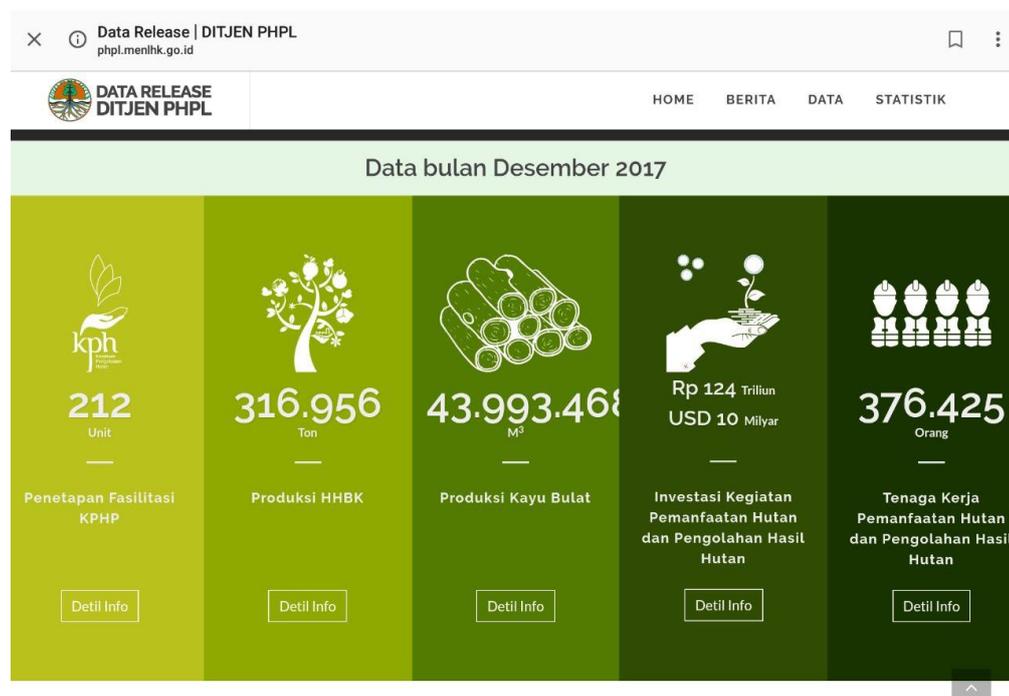
Gambar 21. *Dashboard* Monev Bappenas yang Menampilkan Kegiatan Ditjen PHPL

Indikator realisasi anggaran pada 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan pada Direktorat KPHP dan BPHP berwarna kuning, dikarenakan pada Direktorat KPHP dan BPHP Wilayah VIII Pontianak terdapat sejumlah anggaran yang tidak dapat direalisasikan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

- b. Informasi kinerja Ditjen PHPL terkait Data Strategis dapat diakses melalui alamat <http://phpl.menlhk.go.id>, yang terintegrasi dengan *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Web release* dibangun sebagai bentuk dukungan Ditjen PHPL terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sampai dengan akhir Desember 2017 pengunjung *web release* Ditjen PHPL mencapai 1.500 orang. Ke depan *web release* Ditjen PHPL masih terus disempurnakan sebagai bentuk upaya penyajian data yang akurat dan *reliable*.

Web Release Ditjen PHPL juga terkoneksi dengan akun media sosial Ditjen PHPL (Facebook, Instagram, Twitter dan kanal You Tube), sehingga publik dapat langsung memantau berbagai kegiatan yang sedang dilaksanakan dan capaian kinerja lingkup Ditjen PHPL.

Hasil evaluasi capaian kinerja Ditjen PHPL juga telah dimanfaatkan pada proses perencanaan kegiatan dan anggaran tahun 2018, dengan menyesuaikan kuantitas target kinerja (menaikan angka target) pada Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2018.



Gambar 22. Tampilan *Web Release* Ditjen PHPL Bulan Desember 2017

- c. Melalui proses evaluasi sebagaimana diuraikan pada butir a., seluruh target capaian indikator kinerja program Ditjen PHPL tahun 2017 dapat tercapai, dengan nilai capaian 109,02. Adapun target kinerja yang tidak tercapai lebih disebabkan oleh faktor eksternal.

3. Peningkatan Kinerja Ditjen PHPL

Peningkatan kinerja Ditjen PHPL tidak terlepas dari upaya peningkatan kapasitas SDM Ditjen PHPL dalam mewujudkan birokrasi kompeten dan inovatif, yang dilakukan melalui perubahan pola pikir, kompetensi dan kepercayaan diri, dengan melaksanakan kegiatan :

- a. Bekerja sama dengan NUFFIC NESO (*Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education*) untuk penyelenggaraan TOT (*Tailor Made Training*). NUFFIC NESO bertujuan salah satunya untuk membantu membangun Indonesia dengan SDM berdaya saing global, melalui pelatihan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan (*demand driven*) organisasi pengaju. Kegiatan diawali pada tahun 2015 dimana Ditjen PHPL mengajukan *Letter of Interest*. Pada bulan Agustus 2016 Ditjen PHPL menyampaikan *Training Outline* (TO) dengan judul "*Assessment of the Effect on Climate Change on Production Forest*", dan pada bulan Desember 2016 NUFFIC NESO Indonesia menyatakan TO Ditjen PHPL memenuhi persyaratan untuk mendapatkan TMT ke Belanda, untuk maksimal 20 (dua puluh) orang. Sepanjang tahun 2017, Ditjen PHPL telah memfasilitasi kegiatan persiapan training ke Belanda dengan kursus dan test TOEFL, yang dilengkapi dengan *Speaking and Interview Skills and Strategies*. Kursus TOEFL diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang dan dilaksanakan selama 20 (dua puluh) kali pertemuan, dari tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan 18 April 2017, bekerja sama dengan International Language Program. Hasil nilai test TOEFL di atas 450 diraih oleh 17 (tujuh belas) orang. Pelaksanaan training ke Belanda diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan April 2018.
- b. Pelatihan Asesor SVLK yang dilaksanakan dalam rangka menyambut tahun sertifikasi legalitas hasil hutan pada tahun 2018, untuk meningkatkan jumlah asesor auditor independen yang pada saat ini masih terbatas. Pelatihan SVLK dilaksanakan pada tanggal 15 – 19 Mei 2017, bekerjasama dengan Komite Akreditasi Nasional, dengan jumlah peserta 25 (dua puluh lima) orang. Dari hasil evaluasi, peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 13 (tiga belas) orang.

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Ditjen PHPL merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan program Ditjen PHPL menuju *good governance*. Sebagai pengelola hutan produksi di Indonesia, Ditjen PHPL telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi pengelolaan Hutan Produksi dengan segenap kendala dan tantangan, tugas pengelolaan keuangan negara dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Namun demikian, aparaturnya Ditjen PHPL telah berhasil mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Hal ini tampak pada pencapaian kinerja pada tahun 2017 sebesar **109,02%** dengan nilai efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,82 (kategori **efisien**)

Langkah-langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Ditjen PHPL dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, sesuai dengan konfigurasi bisnis baru pengelolaan hutan produksi, antara lain:

- 1) Peningkatan akses masyarakat dan ekonomi masyarakat sekitar hutan, dan kewajiban mengalokasikan 20% areal izin dalam bentuk usaha kemitraan dengan masyarakat;
- 2) Kontribusi terhadap NDC (*Nationally Determined Contribution*) melalui pembentukan unit manajemen multibisnis KPHP yang sekaligus sebagai wujud pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dan penerapan RIL (*Reduce Impact Logging*) oleh pemegang izin;
- 3) Penyederhanaan birokrasi dengan menerapkan sistem informasi;
- 4) Peningkatan daya saing produk dan ekspor dengan melakukan berbagai upaya keberterimaan produk di pasar global;
- 5) Peningkatan PNBPN dari Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Ditjen PHPL, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga Ditjen PHPL dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

LAMPIRAN

Lampiran 1



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA, M. Sc

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2016

Pihak Kedua,

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Pihak Pertama,

Dr. Ir. IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA, M. Sc
NIP. 19590502 198603 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN**

No. (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
a.	Meningkatnya Sumbangan Hutan Produksi (Termasuk Industri) Pada Devisa dan Penerimaan Negara. - Meningkatkan sumbangan PNBP dari Hutan Produksi (termasuk Industri) - Meningkatkan nilai ekspor ekspor industri hasil hutan kayu	Jumlah PNBP dari hutan produksi Nilai ekspor produk industri kehutanan	sebesar Rp 2.796 Trilyun tahun 2017 sebesar US\$ 8,03 Miliar
b.	Meningkatnya Pengelolaan Hutan Produksi di Tingkat Tapak Secara Lestari. - Meningkatkan kerjasama KPHP dalam memproduksi barang dan jasa - Menurunnya luas areal kebakaran hutan produksi	Jumlah KPHP yang melakukan kerjasama pengelolaan hutan produksi Jumlah KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran	63 KPH 53 KPHP

No.

Program/Kegiatan

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan

1. Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi.
2. Peningkatan Usaha Hutan Produksi.
3. Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK.
4. Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan.
5. Peningkatan Usaha Industri Kehutanan.
6. Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan.
7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Anggaran (Rp. 1.000,-)
489.724.426

Jakarta, Desember 2016

MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI



Dr. Ir. IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA, M. Sc
NIP. 19590502 198603 1 001

Lampiran 2 Realisasi Anggaran Ditjen PHPL Tahun 2017

MONITORING SERAPAN ANGGARAN DITJEN PHPL TAHUN 2017

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	%
I	PUSAT			
1	Setditjen PHPL	47.786.000.000	47.814.503.641	100,06
2	Direktorat KPHP	9.592.482.000	7.099.641.451	74,01
3	Direktorat UHP	6.532.000.000	6.446.434.638	98,69
4	Direktorat UJL HHBK HP	4.948.000.000	4.844.660.129	97,91
5	Direktorat IPHH	5.515.000.000	5.481.220.030	99,39
6	Direktorat PPHH	6.415.000.000	6.253.942.638	97,49
	JUMLAH I	80.788.482.000	77.940.402.527	96,47
		18,01%		
II	U P T			
7	BPHP Wilayah 1 Banda Aceh	5.351.032.000	5.302.550.085	99,09
8	BPHP Wilayah 2 Medan	15.523.301.000	13.813.430.742	88,99
9	BPHP Wilayah 3 Pekanbaru	29.582.266.000	28.366.682.316	95,89
10	BPHP Wilayah 4 Jambi	22.165.867.000	18.433.586.237	83,16
11	BPHP Wilayah 5 Palembang	32.720.205.000	31.187.485.328	95,32
12	BPHP Wilayah 6 Bandar Lampung	21.096.429.000	19.279.292.604	91,39
13	BPHP Wilayah 7 Denpasar	27.268.947.000	23.388.739.916	85,77
14	BPHP Wilayah 8 Pontianak	13.298.074.000	6.978.199.640	52,48
15	BPHP Wilayah 9 Banjarbaru	23.825.888.000	22.408.151.559	94,05
16	BPHP Wilayah 10 Palangkaraya	24.686.751.000	23.312.193.901	94,43
17	BPHP Wilayah 11 Samarinda	23.872.441.000	18.962.884.189	79,43
18	BPHP Wilayah 12 Palu	33.388.710.000	31.576.806.036	94,57
19	BPHP Wilayah 13 Makassar	31.556.888.000	27.810.596.771	88,13
20	BPHP Wilayah 14 Ambon	24.313.820.000	17.123.830.159	70,43
21	BPHP Wilayah 15 Jayapura	24.308.259.000	20.376.146.351	83,82
22	BPHP Wilayah 16 Manokwari	14.907.627.000	14.206.328.221	95,30
	JUMLAH II	367.866.505.000	322.526.904.055	87,67
		81,99%		
	JUMLAH TOTAL	448.654.987.000	400.467.306.582	89,26
		100,00%		

Lampiran 3.

REALISASI ANGGARAN DAN OUTPUT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TA.2017

NO	SATUAN KERJA	PAGU APBN	REALISASI (Rp)	(%)	TARGET OUTPUT	REALISASI OUTPUT	(%)
	PUSAT:	80.788.482.000	77.940.402.527	96,47	72.376.309,83	87.135.629,50	
1	SETDITJEN PHPL	47.786.000.000	47.814.503.641	100,06	82,00	82,60	100,73
2	DIREKTORAT KPHP	9.592.482.000	7.099.641.451	74,01	4.000.232,00	4.019.550,00	100,48
3	DIREKTORAT UHP	6.532.000.000	6.446.434.638	98,69	38.822.228,00	45.386.201,24	116,91
4	DIREKTORAT UJL HHBK HP	4.948.000.000	4.844.660.129	97,91	352.015,00	377.514,61	107,24
5	DIREKTORAT PPHH	6.415.000.000	6.253.942.638	97,49	29.201.582,03	37.351.997,22	127,91
6	DIREKTORAT IPHH	5.515.000.000	5.481.220.030	99,39	170,80	283,83	166,18
	UPT:	367.866.505.000	322.526.904.055	87,67	538,00	526,05	
7	BPHP WILAYAH I BANDA ACEH	5.351.032.000	5.302.550.085	99,09	16,00	16,00	100,00
8	BPHP WILAYAH II MEDAN	15.523.301.000	13.813.430.742	88,99	24,00	24,00	100,00
9	BPHP WILAYAH III PEKANBARU	29.582.266.000	28.366.682.316	95,89	43,00	43,00	100,00
10	BPHP WILAYAH IV JAMBI	22.165.867.000	18.433.586.237	83,16	30,00	30,00	100,00
11	BPHP WILAYAH V PALEMBANG	32.720.205.000	31.187.485.328	95,32	44,00	44,00	100,00
12	BPHP WILAYAH VI BANDAR LAMPUNG	21.096.429.000	19.279.292.604	91,39	29,00	29,00	100,00
13	BPHP WILAYAH VII DENPASAR	27.268.947.000	23.388.739.916	85,77	36,00	36,00	100,00
14	BPHP WILAYAH VIII PONTIANAK	13.298.074.000	6.978.199.640	52,48	30,00	18,05	60,17
15	BPHP WILAYAH IX BANJARBARU	23.825.888.000	22.408.151.559	94,05	34,00	34,00	100,00
16	BPHP WILAYAH X PALANGKARAYA	24.686.751.000	23.312.193.901	94,43	45,00	45,00	100,00
17	BPHP WILAYAH XI SAMARINDA	23.872.441.000	18.962.884.189	79,43	31,00	31,00	100,00
18	BPHP WILAYAH XII PALU	33.388.710.000	31.576.806.036	94,57	44,00	44,00	100,00
19	BPHP WILAYAH XIII MAKASSAR	31.556.888.000	27.810.596.771	88,13	41,00	41,00	100,00
20	BPHP WILAYAH XIV AMBON	24.313.820.000	17.123.830.159	70,43	32,00	32,00	100,00
21	BPHP WILAYAH XV JAYAPURA	24.308.259.000	20.376.146.351	83,82	35,00	35,00	100,00
22	BPHP WILAYAH XVI MANOKWARI	14.907.627.000	14.206.328.221	95,30	24,00	24,00	100,00
	TOTAL	448.654.987.000	400.467.306.582	89,26	72.376.848	87.136.156	120,39

Lampiran 4 Realisasi IKK Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TAHUN 2017

No	Output	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Sekretariat Ditjen PHPL				
1	Tata Kelola pemerintahan yang baik	74 Poin	70,60 Poin	95,41
Direktorat KPHP				
1	Hutan Produksi yang siap untuk dimanfaatkan dalam skema	4.000.000 Ha	4.019.306 Ha	100,48
2	KPHP yang beroperasi di hutan produksi	209 UM	212 UM	101,44
3	KPHP yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi	3 UM	5 UM	166,67
4	Unit Manajemen yang memenuhi syarat untuk diberikan	8 UM	15 UM	187,50
Direktorat UHP				
1	Produksi Kayu Bulat dari Hutan Alam	5.800.000 M3	6.779.458 M3	116,89
2	Produksi Kayu Bulat dari Hutan Tanaman	33.000.000 M3	38.586.232 M3	116,93
3	Hutan di Kalimantan yang dibangun dengan Silvikultur	2.000 Ha	2.139 Ha	106,95
4	Usaha Pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi	20.000 Ha	19.167 Ha	95,84
5	IUPHHK HA yang dievaluasi kinerjanya	199 Unit	183 Unit	91,96
6	IUPHHK HT yang dievaluasi kinerjanya	17 Unit	10 Unit	58,82
Direktorat PPHH				
1	Produk kayu olahan yang berasal dari IUPHHK Bersertifikat	29.200.000 M3	37.347.760 M3	127,90
2	Ekspor Produk Industri Kehutanan	8,03 USD M	10,98 USD M	136,74
3	Investasi Industri Kehutanan	540 Miliar	2.902 Miliar	537,41
4	Forest Based Cluster Industry	4 Unit	4 Unit	100,00
5	Industri Primer Hasil Hutan yang menggunakan sistem pengendalian bahan baku online	1.018 Unit	1.308 Unit	128,49
Direktorat UJL dan HHBK HP				
1	Unit Usaha Jasa Lingkungan/Jasa wisata di Hutan Produksi	3 Unit	3 Unit	100,00
2	Produksi komoditas HHBK	252.000 Ton	316.956 Ton	125,78
3	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem	100.000 Ha	60.544 Ha	60,54
Direktorat Iuran dan PHH				
1	PNBP dari Hutan Produksi	2,80 Trilyun	2,82 Trilyun	100,93
2	Unit yang Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran	155 UM	268 UM	172,90
Balai Pengelolaan Hutan Produksi				
1	Data dan informasi hutan produksi	16 Wilayah	16 Wilayah	100,00
2	Produksi dan Kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan	16 Wilayah	16 Wilayah	100,00
3	Data dan informasi penatausahaan hasil hutan	16 Wilayah	15,75 Wilayah	98,44
4	Data dan informasi industri primer hasil hutan	16 Wilayah	16 Wilayah	100,00
5	KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran	59 KPHP	53 KPHP	89,83
6	KPHP yang dapat dilindungi dari gangguan dan konflik	149 KPHP	143,00 KPHP	95,97
7	KPHP yang melakukan kerjasama pengelolaan hutan produksi berbasis masyarakat desa setempat	63 KPHP	62 KPHP	98,41
Total 28 Output				

Lampiran 5. Capaian Indikator Kinerja Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015 - 2017

Nama Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra					Realisasi				Realisasi s.d 2017 (%)		
				2015	2016	2017	s.d 2017	s.d 2019	2015	2016	2017	s.d 2017	Terhadap Renja / RKA	Terhadap Renstra s.d 2017	Terhadap Renstra s.d 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	18	19	20
INDIKATOR KINERJA UTAMA KLHK															
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan		Meningkatnya Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Devisa dan Penerimaan Negara													
	1	Jumlah PNB dari Hutan Produksi	Trilyun Rupiah	2,642	2,719	2,796	2,796	3,127	3.542	2,780	2,822	2,822	100,79	100,93	90,25
	2	Nilai ekspor produk industri kehutanan	USD M	6,95	7,47	8,03	22,45	40,37	9,62	9,27	10,98	29,87	133,05	133,05	73,99
		Meningkatnya Pengelolaan Hutan Produksi di Tingkat Tapak Secara Lestari													
	3	Jumlah KPHP yang melakukan kerjasama pengelolaan hutan produksi	Unit			63	63	133	*)		62	62	98,41	98,41	46,62
	4	Jumlah KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran	Unit			53	53	102	*)		53	53	100,00	100,00	51,96
INDIKATOR KINERJA PROGRAM															
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	1	Luas restorasi ekosistem di hutan produksi (tutupan hutan) meningkat setiap tahun	Ha	450.000	450.000	450.000	1.350.000	2.250.000	490.574	331.268	232.808	1.054.650		78,12	46,87
	2	Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara	Trilyun Rupiah	2,650	2,719	2,796	2,796	3,127	3.542	2,780	2,822	2,822	100,79	100,93	90,25
	3		USD M	6,95	7,47	8,03	22,45	40,37	9,62	9,27	10,98	29,87	133,05	133,05	73,99
	4	Jumlah unit pengelolaan hutan produksi yang beroperasi meningkat setiap tahun	Unit KPHP	80	149	209	209	347	80	114	212	212	101,44	101,44	61,10
	5	Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun	Unit	22	23	25	70	122	54	53	44	151		215,71	123,77

Lampiran 5. Capaian Indikator Kinerja Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015 - 2017

Nama Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra					Realisasi				Realisasi s.d 2017 (%)		
				2015	2016	2017	s.d 2017	s.d 2019	2015	2016	2017	s.d 2017	Terhadap Renja / RKA	Terhadap Renstra s.d 2017	Terhadap Renstra s.d 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	18	19	20
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN															
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	1	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 78 (A)	Poin	70	72	74	74	78	81,51	88,19	70,60	70,60	100,86	95,41	90,51
Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	2	Jumlah KPHP yang beroperasi di hutan produksi sebanyak 347 KPHP	Unit	80	149	209	209	347	80	147	212	212	101,44	101,44	61,10
	3	Hutan Produksi yang siap untuk dimanfaatkan dalam skema perhutanan sosial	Ha								4.019.306	4.019.306	100,48		
	4	Jumlah Provinsi yang memiliki arahan pemanfaatan dan investasi di hutan produksi yang belum dibebani izin di 27 Provinsi	Propinsi	27	27	27	27	27	27	27	0	27	100,00	100,00	100,00
	5	Jumlah KPHP yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari sebanyak 20 KPHP	Unit	2	3	5	10	20	3	3	5	11	137,50	110,00	55,00
	6	Jumlah unit yang memenuhi syarat untuk diberikan IUPHHK HA/RE/HTI di hutan produksi sebanyak 35 unit	Unit	6	6	8	20	35	10	21	15	46	230,00	230,00	131,43
	Peningkatan Usaha Hutan Produksi	7	Jumlah produksi kayu bulat dari hutan alam sebesar 29 juta m3 selama 5 tahun	M3	5.600.000	5.700.000	5.800.000	17.100.000	29.000.000	5.843.179	6.299.000	6.779.458	18.921.637	110,65	110,65
8		Jumlah produksi kayu bulat dari hutan tanaman sebesar 160 juta m3 selama 5 tahun	M3	26.000.000	32.000.000	33.000.000	91.000.000	160.000.000	24.991.680	31.712.000	38.586.232	95.289.912	104,71	104,71	59,56
9		Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi seluas 100.000 ha	Ha	20.000	20.000	20.000	60.000	100.000	35.576	16.871	18.167	70.614	176,54	117,69	70,61
10		Luas hutan di Kalimantan yang dibangun dengan silvikultur intensif seluas 11.000 ha	Ha	800	1.200	2.000	4.000	11.000	7.561,78	8.123,21	2.138,94	17.824	356,48	445,60	162,04

Lampiran 5. Capaian Indikator Kinerja Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015 - 2017

Nama Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra					Realisasi				Realisasi s.d 2017 (%)		
				2015	2016	2017	s.d 2017	s.d 2019	2015	2016	2017	s.d 2017	Terhadap Renja / RKA	Terhadap Renstra s.d 2017	Terhadap Renstra s.d 2019
1	11	Jumlah unit IUPHHK-HA yang aktif beroperasi melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan produksi sebanyak 220 unit hingga tahun 2019	Unit	177	188	199	199	220	177	187	183	183	91,96	91,96	83,18
	12	Jumlah unit IUPHHK-HT yang kinerja usaha pemanfaatannya menjadi "Layak Dilanjutkan (LD)" bertambah sebanyak 175 Unit hingga tahun 2019	Unit	32	34	36	102	175	30	21	10	61	73,49	59,80	34,86
Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil hutan dan Iuran kehutanan	13	Jumlah PNPB dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 15% dari penerimaan Tahun 2014 sebesar Rp. 2,565 Trilyun selama 5 Tahun	Trilyun Rupiah	2,642	2,719	2,796	2,796	3,127	3,542	2,780	2,822	2,822	100,79	100,93	90,25
	14	Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan dalam rangka pemanfaatan hutan produksi secara tertib sebanyak 175 unit	Unit	135	145	155	155	175	148	268	268	268	172,90	172,90	153,14
Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi	15	Jumlah unit usaha jasa lingkungan/ pemanfaatan air/jasa wisata di hutan produksi sebanyak 9 unit	Unit	1	2	2	5	9	2	2	3	7	116,67	140,00	77,78
	16	Jumlah produksi HHBK meningkat sebesar 20% selama 5 tahun dari produksi tahun 2014 sebesar 225.000 ton	Ton	234.000	243.000	252.000	252.000	270.000	217.694,43	443.837	316.955	316.955,00	125,78	125,78	117,39
	17	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem meningkat ditahun 2019 seluas 500.000 ha	Ha	100.000	100.000	100.000	300.000	500.000	57.665	69.140	60.544	187.349	62,45	62,45	37,47
Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	18	Jumlah nilai investasi industri kehutanan meningkat sebesar Rp. 2,7 Trilyun selama 5 tahun	Milyar Rupiah	540	540	540	1.620	2.700	2.143	1.503	2.902	6.548	404,21	404,21	242,53
	19	Jumlah Forest Based Cluster Industry yang terbentuk sebanyak 15 unit	Unit	2	2	4	8	15	2	2	4	8	100,00	100,00	53,33
	20	Nilai ekspor produk industri kehutanan sebesar USD 40,37 Miliar selama 5 Tahun	USD M	6,95	7,47	8,03	22,45	40,37	9,62	9,27	10,98	29,87	133,05	133,05	73,99
	21	Jumlah produk kayu olahan meningkat sebesar 15% dari produksi tahun 2014 sebesar 26,5 juta m3 yang berasal dari IUIPHHK yang bersertifikat legalitas kayu	Juta M3	27,60	28,40	29,20	29,20	30,80	29,97	31,35	37,35	37,35	127,91	127,91	121,27
	22	Jumlah industri primer hasil hutan yang menggunakan sistem pengendalian bahan baku on line meningkat sebesar 50% dari jumlah tahun 2014 sebesar 784 unit	Unit	862	940	1.018	1.018	1.174	890	1.280	1.308	1.308	128,49	128,49	111,41

Lampiran 5. Capaian Indikator Kinerja Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015 - 2017

Nama Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra					Realisasi				Realisasi s.d 2017 (%)		
				2015	2016	2017	s.d 2017	s.d 2019	2015	2016	2017	s.d 2017	Terhadap Renja / RKA	Terhadap Renstra s.d 2017	Terhadap Renstra s.d 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	18	19	20
Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan	23	Jumlah KPHP yang beroperasi di Hutan Produksi sebanyak 347 KPHP	Unit	80	149	209	209	347	80	111	142	142	95,95	67,94	40,92
	24	KPHP yang dapat dilindungi dari gangguan dan konflik keamanan hutan	Unit			148	148	347 *)			143	143	96,62		41,21
	25	KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran	Unit			53	53	102 *)			53	53	100,00		51,96
	26	KPHP yang melakukan kerjasama pengelolaan hutan produksi berbasis masyarakat desa setempat	Unit			63	63	133 *)			62	62	98,41		46,62
	27	Jumlah Wilayah yang memiliki Data dan Informasi Hutan Produksi sebanyak 18 Wilayah	Wilayah	18	18	18	18	16	18	17	16	16	100,00	88,89	100,00
	28	Jumlah Wilayah yang Produksi dan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan meningkat	Wilayah	18	18	18	18	16	18	17	16	16	100,00	88,89	100,00
	29	Jumlah Wilayah yang memiliki Data dan Informasi Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan di 18 Wilayah	Wilayah	18	18	18	18	16	18	15	15,75	16	98,44	87,50	98,44
	30	Jumlah Wilayah yang memiliki Data dan Informasi Industri Primer Hasil Hutan di 18 Wilayah	Wilayah	18	18	18	18	16	18	17	16	16	100,00	88,89	100,00

Keterangan

- *) Belum tercantum dalam Renstra
- Capaian yang sudah melebihi target Renstra s.d 2019
- Realisasi belum mencapai 50 % dari target Renstra s.d 2019
- *) Sedang dalam proses pembahasan usulan Prioritas Nasional

LAMPIRAN 6

**KPHP YANG MELAKUKAN KERJASAMA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERBASIS MASYARAKAT
DESA SETEMPAT TAHUN 2017**

No	SATKER	KOMODITI	UNIT
	JUMLAH UNIT		63
1	BPWP WILAYAH II MEDAN		1
	1 KPHP Unit XXIX Mandailing Natal	Madu, Nilam, Jahe Merah	
2	BPWP WILAYAH III PEKANBARU		3
	1 KPHP Unit IX Minas Tahura	Madu, Lada	
	2 KPHP Unit XVIII Kampar Kiri	Madu	
	3 KPHP Unit XXII Tasik Besar Serkap	Madu, Nanas, Karet	
3	BPWP WILAYAH IV JAMBI		2
	1 KPHP Unit I Kerinci	Madu, Air minum dalam kemasan	
	2 KPHP Unit VII Limau	Madu, Minyak Kepayang	
4	BPWP WILAYAH V PALEMBANG		6
	1 KPHP Unit VII dan VIII Benakat Bukit Cogong	Getah karet, Madu, Jahe Merah	
	2 KPHP Unit VI Lakitan	Arang, Asap Cair, Agroforestry	
	3 KPHP Unit III Lalan Mangsang Mendis	Karet, Jasling	
	4 KPHP Unit IV Meranti	Jahe Merah, Jasling	
	5 KPHP Unit V Rawas	Nilam, Jasling	
	6 KPHP Unit V Sungai Sembulan	Madu, Gaharu, Jasling	
5	BPWP WILAYAH VI BANDAR LAMPUNG		5
	1 KPHP Unit I Muko-Muko	Jasling, Kayu	
	2 KPHP Unit III Bukit Punggur	Kopi, Madu, Jasling	
	3 KPHP Unit IV Muara Dua	Padi, Jasling, Kambing	
	4 KPHP Unit VI Way Terusan	Padi, Jasling	
	5 KPHP Unit XVI Gedong Wani	Minyak Sereh, Kambing, Kayu	
6	BPWP WILAYAH VII DENPASAR		7
	1 KPHP Unit Yogyakarta	Ulat Sutera, Murbei, Wisata	
	2 KPHP Unit IX Batulanteh	Serah Wangi, Kayu Putih	
	3 KPHP Unit V Sejong	Madu, Jasling	
	4 KPHP Unit XVIII Tambora Utara	Madu, Jasling	
	5 KPHP Unit XXIII Maria	Bambu, Kemiri, Madu	
	6 KPHP Unit I Manggarai Barat	Wisata Alam, Madu	
	7 KPHP Unit XVI Rote Ndao	Madu, Kayu Putih, Jasling	
7	BPWP WILAYAH VIII PONTIANAK		1
	1 KPHP Unit XVIII & XIX Kapuas Hulu	-	
	<i>Keterangan : Fasilitas untuk KPHP Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat direalisasikan</i>		
8	BPWP WILAYAH IX BANJARBARU		5
	1 KPHP Unit I Kayu Tangi	Kemiri, Jahe Merah	
	2 KPHP Unit III Pulau Laut Sebuku	Madu, Durian, Cengkeh	
	3 KPHP Unit V & X Tabalong	Kemiri, Lada, Kopi, Madu, Wisata	
	4 KPHP Unit VI Kusan	Madu, Kayu Manis, Kemiri	
	5 KPHP Unit VII Tanah Laut	Jamur, Madu, Wisata Alam	

No	SATKER	KOMODITI	UNIT
9	BPHP WILAYAH X PALANGKARAYA		3
	1 KPHP Unit II Murung Raya	Bambu, Ekowisata	
	2 KPHP Unit XVI Kahayan Hulu	Jahe Merah, Madu	
	3 KPHP Unit XXIII Sukamara - Lamandau	Jabon, Jagung, Padi, Madu	
10	BPHP WILAYAH XI SAMARINDA		3
	1 KPHP Unit XXII Berau Barat	Gaharu, Kayu Manis, Jahe, Tahongai	
	2 KPHP Unit XXI Meratus	Karet, Kompos, Agroforestry	
	3 KPHP Unit XXXIV Kendilo	Padi, Jagung, Bio Energi, Wisata Alam	
11	BPHP WILAYAH XII PALU		11
	1 KPHP Unit IV Gorontalo Utara	Nilam, Gula Semut	
	2 KPHP Unit V Boalemo	Ulat Sutera, Rotan, Murbei	
	3 KPHP Unit VI Gorontalo	Gula Aren, Getah Pinus, Biotanol	
	4 KPHP Unit I Pogogul	Madu, Jamur, Jabon, Rotan, Jasling	
	5 KPHP Unit IV Dampelas Tinombo	Karet, Nilam, Aren, Gaharu, Pala	
	6 KPHP Unit VI dan IX Dolago Tanggunung	Madu, Kemiri, Nilam	
	7 KPHP Unit XI Sintuwu Maroso	Rotan, Rotan, Gaharu, Kopi, Getah	
	8 KPHP Unit XIX Toili Baturube	Damar, Gula Semut, Damar, Kopal Alam	
	9 KPHP Unit XVII Sivia Patuju	Madu, Kemiri, Nilam	
	10 KPHP Unit XX Balantak	Jagung, Kemiri, Pala, Getah Pinus	
	11 KPHP Unit IV Poigar	Jabon Merah, Jagung, Gula Aren, Kemiri	
12	BPHP WILAYAH XIII MAKASSAR		8
	1 KPHP Unit V Budong - Budong	Gula Semut	
	2 KPHP Unit VI Karama	Nilam, Madu	
	3 KPHP Unit VII Mamasa Barat	Sengon, Jagung, Kopi	
	4 KPHP Unit IX Jeneberang	Jati, Gula Aren, Bambu	
	5 KPHP Unit V dan VI Awota	Ulat Sutra	
	6 KPHP Unit III Lakompa	Rotan	
	7 KPHP Unit X Tina Orima Bombana	Nilam	
	8 KPHP Unit XXIV Gularaya	Madu	
13	BPHP WILAYAH XIV AMBON		3
	1 KPHP Unit II Wae Apu	Kayu Putih, Madu, Damar	
	2 KPHP Unit X Gunung Sinopa	Minyak Kelapa, Madu, Pala	
	3 KPHP Unit XIII Bacan	Madu, Damar, UJL	
14	BPHP WILAYAH XV JAYAPURA		3
	1 KPHP Unit XVII Waropen	Kulit Mashohi, Sagu	
	2 KPHP Unit XXI Memberamo	Kulit Mashohi, Gaharu, Buah Merah	
	3 KPHP Unit XXIX Keerom	Nilam, Gaharu	
15	BPHP WILAYAH XVI MANOKWARI		2
	1 KPHP Unit II Sorong	Pala, Sagu, Mangrove	
	2 KPHP Unit V Sorong Selatan	Gaharu, Damar	

LAMPIRAN 7

KPHP YANG DAPAT DILINDUNGI DARI ANCAMAN KEBAKARAN TAHUN 2017

No	SATKER	UNIT
	JUMLAH UNIT	59
1	BPHP WILAYAH III PEKANBARU	10
	1 KPHP Unit IX Minas Tahura	
	2 KPHP Unit V Bengkalis	
	3 KPHP Unit VII Siak	
	4 KPHP Unit XIV Rokan Hulu	
	5 KPHP Unit XVIII Kampar Kiri	
	6 KPHP Unit XX Pelalawan	
	7 KPHP Unit XXI Pelalawan	
	8 KPHP Unit XXII Tasik Besar Serkap	
	9 KPHP Unit XXIV Tebing Tinggi	
	10 KPHP Unit XXX Indragiri Hulu	
2	BPHP WILAYAH IV JAMBI	6
	1 KPHP Unit I Kerinci	
	2 KPHP Unit IX Tebo Barat	
	3 KPHP Unit VI Bukit Lubuk Pekak-Hulu Landai, Merang	
	4 KPHP Unit VIII Hilir	
	5 KPHP Unit VII Limau	
	6 KPHP Unit X Tebo Timur	
3	BPHP WILAYAH V PALEMBANG	7
	1 KPHP Unit VII dan VIII Benakat Bukit Cogong	
	2 KPHP Unit VI Lakitan	
	3 KPHP Unit III Lalan Mangsang Mendis	
	4 KPHP Unit IV Meranti	
	5 KPHP Unit V Rawas	
	6 KPHP Unit XIV Suban Jeriji	
	7 KPHP Unit II Lalan Sembilang	
4	BPHP WILAYAH VIII PONTIANAK	6
	1 KPHP Unit X Sungai Merakai	
	2 KPHP Unit XVIII & XIX Kapuas Hulu	
	3 KPHP Unit XXIII Menukung	
	4 KPHP Unit XXIV Sokan	
	5 KPHP Unit XXV Belimbing	
	6 KPHP Unit XXXII Kendawangan Ketapang	
	<i>Keterangan : Fasilitasi untuk KPHP Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat direalisasikan</i>	

No	SATKER	UNIT
5	BPHP WILAYAH IX BANJARBARU	6
	1 KPHP Unit I Kayu Tangi	
	2 KPHP Unit III Pulau Laut	
	3 KPHP Unit V & X Tabalong	
	4 KPHP Unit VI Kusan	
	5 KPHP Unit VII Tanah Laut	
	6 KPHP Unit Cantung (KPHP Daerah)	
6	BPHP WILAYAH X PALANGKARAYA	16
	1 KPHP Unit II Murung Raya	
	2 KPHP Unit III Kahayan Tengah	
	3 KPHP Unit V Barito Hulu	
	4 KPHP Unit XIV Barito Hilir	
	5 KPHP Unit XVI Kahayan Hulu	
	6 KPHP Unit XXI Seruyan Hulu	
	7 KPHP Unit XXII dan XXVI Kota Waringin Kota	
	8 KPHP Unit XXIII Sukamara - Lamandau	
	9 KPHP Unit XXIX Mentaya Hulu - Seruyan Tengah	
	10 KPHP Unit XXXI Kahayan Hilir	
	11 KPHP Unit XXIX Mentaya Tengah - Seruyan Hilir	
	12 KPHP Unit VIII Barito Tengah	
	13 KPHP Unit XI Kapuas Tengah	
	14 KPHP Unit XVII Katingan Hulu	
	15 KPHP Unit XVII Katingan Hilir	
	16 KPHP Unit X Kapuas Hulu	
7	BPHP WILAYAH XV JAYAPURA	8
	1 KPHP Unit LI Boven Digul	
	2 KPHP Unit XIX Yapen	
	3 KPHP Unit XLIII Nduga	
	4 KPHP Unit XVII Waropen	
	5 KPHP Unit XXI Memberamo	
	6 KPHP Unit XXII Sarmi	
	7 KPHP Unit XXIX Keerom	
	8 KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura	



DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 5
Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp. 021-5730236 / Fax. 021-5733336



Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari



@DitjenPHPL



@DitjenPHPL



Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

